

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Ambon

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 714 dan 715. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Ambon berdasarkan Provinsi meliputi Perairan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program

dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Ambon berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP

Ambon didukung oleh sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. SDM Stasiun PSDKP Ambon terdiri dari pegawai PNS, PPPK, PPNPN dan PJLP dengan total sebanyak 89 orang yang tersebar di UPT, Satwas, dan Wilker dengan perincian:

- Stasiun PSDKP Ambon sebanyak 25 orang PNS, 14 orang PPPK, 7 orang PPPK paruh waktu, dan 4 orang PJLP;
- Satwas SDKP Seram Bagian Timur sebanyak 4 orang PNS;
- Satwas SDKP Ternate sebanyak 6 orang PNS, 1 orang PPPK paruh waktu, dan 1 orang PJLP;
- Satwas SDKP Halmahera Selatan sebanyak 2 orang PNS, 2 orang PPPK, dan 1 orang PPPK Paruh Waktu;
- Satwas SDKP Morotai sebanyak 2 orang PNS, dan 1 orang PJLP;
- Kapal Pengawas KP Hiu 13 sebanyak 9 orang PNS, dan 2 orang PPPK;
- Kapal Pengawas Lainnya, antara lain : KP. ORCA 04 sebanyak 2 orang PPPK; KP. ORCA 01 sebanyak 1 orang PPPK; KP. PAUS 01 sebanyak 1 orang PPPK; KP. HIU 14 sebanyak 1 orang PPPK, KP. HIU MACAN 04 (BIAK) sebanyak 1 orang PPPK, KP. HIU MACAN TUTUL sebanyak 1 orang PPPK, dan KP. HIU MACAN 06 sebanyak 1 orang PPPK.

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain: Gedung Kantor, Mess AKP (Ambon), Gedung Kantor Satwas SDKP Seram Bagian Timur (Banda Neira), Gedung Kantor Satwas SDKP Ternate, Mess Satwas SDKP Ternate, Gedung Kantor Satwas SDKP Halmahera Selatan, Mess SDKP Halmahera Selatan, Gedung Kantor Satwas SDKP Morotai, Kapal Pengawas Hiu 13, Speedboat Napoleon 051 (Satwas SDKP Seram Bagian Timur), Speedboat Napoleon 055 (Satwas SDKP Ternate), Speedboat Napoleon 040 dan Speedboat Tenggara (Stasiun PSDKP Ambon). Lahan yang digunakan kantor dan Mess Satwas SDKP Halmahera

Selatan dan Ternate bukan merupakan milik Stasiun PSDKP Ambon, melainkan status pinjam pakai milik Pelabuhan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) dan modul Aset pada aplikasi SAKTI Kemenkeu. Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Stasiun PSDKP Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Dasar*

#### *Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### *Kebijakan*

#### *Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara First In First Out (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Ambon adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 2025 yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut: Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh

tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

*Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang* **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya* **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **f. Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **g. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan akhir periode Desember 2025, Stasiun PSDKP Ambon telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 11 (sebelas) kali sejak DIPA Awal. Terdapat perubahan nominal pagu anggaran, dari pagu awal sebesar Rp21.112.804.000 menjadi Rp18.889.373.000. Rincian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025  
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan Negara</b>		
Pendapatan Perpajakan		
Pajak	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	-	-
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	7,459,921,000	8,419,051,000
Belanja Barang	12,358,957,000	10,470,322,000
Belanja Modal	1,293,926,000	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>21,112,804,000</b>	<b>18,889,373,000</b>

Pada Stasiun PSDKP Ambon terdapat pagu anggaran Prioritas Nasional, rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional diantaranya adalah sebagai berikut :

Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Vol. RO	Progres Capaian (%)
2350	QHD	001	Operasi Kapal Pengawas	6,662,805,000	5,738,108,663	86.12	51	Operasi	51	100
2350	QHD	003	Operasi Speedboat Pengawas	304,053,000	302,413,175	99.46	10	Operasi	10	100
2352	RCG	001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	825,298,000	822,786,493	99.70	7	Unit	7	100
2352	QIC	001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	103,899,000	103,522,137	99.64	32	Lembaga	32	100
2353	QIC	002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	124,736,000	124,487,465	99.80	9	Lembaga	23	100
<b>Jumlah</b>				<b>8,020,791,000</b>	<b>7,091,317,933</b>	<b>88.41</b>				<b>100</b>

Dalam Penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Stasiun PSDKP Ambon terdapat pada fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan rincian sebagaimana terlampir :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 SATUAN KERJA : 215141 STASIUN PSDKP AMBON

Tanggal : 27/01/26 7:55 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_fstpg\_satker\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.263.611,000	7.792.156,000	6.863.308,331	0	6.863.308,331	88,08	928.847,669
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	256.615,000	94.385,000	93.508,027	0	93.508,027	99,07	876,973
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	781.747,000	249.140,000	248.204,202	0	248.204,202	99,62	935,798
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	300.000,000	0	0	0	0	null	0
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>9.601.873,000</b>	<b>8.135.681,000</b>	<b>7.205.020,560</b>	<b>0</b>	<b>7.205.020,560</b>	<b>88,56</b>	<b>930.660,440</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.510.831,000	10.753.692,000	10.347.695,815	196	10.347.695,815	98,22	405.996,381
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen</b>	<b>11.510.831,000</b>	<b>10.753.692,000</b>	<b>10.347.695,815</b>	<b>196</b>	<b>10.347.695,815</b>	<b>98,22</b>	<b>405.996,381</b>
	<b>JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>	<b>21.112.804,000</b>	<b>18.889.373,000</b>	<b>17.552.716,375</b>	<b>196</b>	<b>17.552.716,179</b>	<b>92,92</b>	<b>1.336.656,821</b>
	<b>JUMLAH FUNGSI EKONOMI</b>	<b>21.112.804,000</b>	<b>18.889.373,000</b>	<b>17.552.716,375</b>	<b>196</b>	<b>17.552.716,179</b>	<b>92,92</b>	<b>1.336.656,821</b>

Satuan kerja Stasiun PSDKP Ambon (215141) telah melakukan revisi DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

**1. Revisi DIPA ke 01**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 22 Februari 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 0279-1805-7610-0557 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000.

Revisi ke-01 merupakan revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi 1 merupakan revisi *Efisiensi Anggaran* pada kode kegiatan 2350, 2352,2353, dan 2355.

**2. Revisi DIPA ke 02**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 tanggal 21 Maret 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2597-4105-4020-2019 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Revisi ke-02 merupakan revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. - Kode digital stamp mengalami perubahan.

Revisi ke 04 merupakan Revisi Revisi *Output Cadangan* yaitu pergeseran detail akun 2352.999.999.999.A.521211-Belanja Bahan Blokir Kode A 1 Paket 95.000.000 ke Akun

2352.QIC.002.051.H.521211-Belanja Bahan Blokir Kode A 1 Paket 95.000.000.

### **3. Revisi DIPA ke 03**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 tanggal 14 April 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 8109-7274-0425-4050 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. Revisi ke-03 adalah revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan, yang merupakan revisi Operasional Kapal, Kantor, dan Armada PSDKP yang dirawat.

### **4. Revisi DIPA ke 04**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 24 April 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 8109-7274-0425-4050 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 21.112.804.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-04 adalah kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan Revisi ke 8 merupakan revisi pergeseran anggaran dan Revisi Halaman III DIPA.

### **5. Revisi DIPA ke 05**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 23 Mei 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 2775-8072-8863-5900 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke-05 adalah revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan, yang merupakan revisi buka blokir kode-2 pada kegiatan operasi kapal pengawas sumber dana PNBPN.

### **6. Revisi DIPA ke 06**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 11 Juli 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 2775-8072-8863-5900 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-06 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

### **7. Revisi DIPA ke 07**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan), dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Revisi ke-07 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN, serta hasil revisi POK.

### **8. Revisi DIPA ke 08**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 31 Oktober 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-08 adalah revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan, yang merupakan revisi penambahan anggaran pada operasi Kapal Pengawas, serta penambahan detail akun pada kegiatan perjalanan dinas.

### **9. Revisi DIPA ke 09**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 10 Desember 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-09 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi perubahan detail akun pada Belanja pegawai dan belanja barang.

### **10. Revisi DIPA ke 10**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 10 Desember 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-10 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi perubahan detail akun pada kegiatan perjalanan dinas

### 11. Revisi DIPA ke 11

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 30 Desember 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-09 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi perubahan detail akun pada belanja pegawai.

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp7.121.119*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.121.119 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNB*

*(dalam rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2025		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251)	0	6,060,000	0
Pendapatan Denda (4258)	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain (4259)	0	1,061,119	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>7,121,119</b>	<b>0</b>

Pendapatan PNB antara lain berasal dari Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251), dan Pendapatan Lain-Lain (4259) dengan rincian sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan dari **Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251)** yang berasal dari penjualan Peralatan dan Mesin (425122) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.060.000 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan berasal dari hasil lelang peralatan dan mesin, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z No.Pol. DE 5024 LM

dengan risalah Lelang Nomor 118/17.01/2025-01 tanggal 25 Desember 2025.

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari  
Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251)  
(dalam rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2025		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	0	6,060,000	0
<b>Jumlah</b>	-	<b>6,060,000</b>	-

- Realisasi **Pendapatan Lain-lain (4259)** yang berasal dari **Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)** dan **Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)** untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp1.061.119 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Berikut adalah rincian dari Pendapatan Lain-Lain :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain (4259)  
(dalam Rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2025		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911)	0	809,647	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	0	251,472	0
<b>Jumlah</b>	-	<b>1,061,119</b>	-

1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911), antara lain sebagai berikut :

- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Yochni Anwar Idrus, S.St.Pi senilai Rp2.296, dengan Nomor NTB : 806320500792 dan Nomor NTPN : 3884A3CIFTEM2DR5 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Rizqi Tatri Kusuma, S.PI senilai Rp20.879, dengan Nomor NTB : 377506487951 dan Nomor NTPN : B05C07QLV2AK3D3S tanggal 25 April 2025.

- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Sunapit M. Taher senilai Rp1.504, dengan Nomor NTB : 128559484930 dan Nomor NTPN : 3CF806U8F7O7MCH5 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Nedyah Ibrahim, S.Pi senilai Rp517, dengan Nomor NTB : 033869482181 dan Nomor NTPN : ACC7D2G502S9LBS4 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Desember 2024 a.n Lukman Bugis senilai Rp37.000, dengan Nomor NTB : 397240469416 dan Nomor NTPN : FC17C48VVO12FVAT tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Lukman Bugis senilai Rp2.151, dengan Nomor NTB : 776700464172 dan Nomor NTPN : 2DBB07QLV2AK39UK tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Mohamad Asrar Kelian senilai Rp10.110, dengan Nomor NTB:8494944613141 dan Nomor NTPN : 58EDC7QLV2AK397E tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Widyawati Rumakat, S.Pd.I senilai Rp1.053, dengan Nomor NTB : 091788446809 dan Nomor NTPN : AA61A6U8F7O7M892 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Mila Fransiska, S.Pi senilai Rp301, dengan Nomor NTB : 179348443404 dan Nomor NTPN : EEEF70NA0DNGR3GH tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Akadif Ode Ali, A.Md senilai Rp677, dengan Nomor NTB : 261760440480 dan Nomor NTPN : 8CFD455DFIJES22H tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Desember 2024 a.n Frans Doni Saraung, A.Md senilai Rp35.000, dengan Nomor NTB : 970009427064 dan Nomor NTPN : 17BD40NA0DNGQNI4 tanggal 25 April 2025.

- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Muhammad Nur A Marsaoli, S.Pi senilai Rp7.003, dengan Nomor NTB : 279319423834 dan Nomor NTPN : 588B455DFIJERMJJ tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 a.n Tiara Sanla Wattimury, S.Pi senilai Rp882, dengan Nomor NTB : 361456420614 dan Nomor NTPN : C9FFB7QLV2AK2KJH tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2024 a.n M. Asri Umarela, senilai Rp106.400, dengan Nomor NTB : 973277590647 dan Nomor NTPN : 680121JNG83GLE6F tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2024 a.n Lukman Bugis, senilai Rp110.800, dengan Nomor NTB : 104576586679 dan Nomor NTPN : BF2502G502LT2DVF tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2024 a.n Haryati Tianotak, senilai Rp124.200, dengan Nomor NTB : 600156602216 dan Nomor NTPN : 7D1992G502LT2DN3 tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2024 a.n Taufik Kelibia, senilai Rp124.200, dengan Nomor NTB : 906351608889 dan Nomor NTPN : BA7466U8F7HR3DFH tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2024 a.n Haida Wardi, senilai Rp113.300, dengan Nomor NTB : 674090615249 dan Nomor NTPN : 674090615249 tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2024 a.n Abdul Halik Tuakia, senilai Rp111.100, dengan Nomor NTB : 851308618466 dan Nomor NTPN : 98CF461QVCVEMDOI tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Potongan Lain-lain dari pembayaran kekurangan Gaji Berkala bulan Januari-November 2024, senilai Rp274 sesuai SPP No. 00005T tanggal 13 Januari 2025, dan SPM No. 00005A tanggal 17 Januari 2025.

2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912), antara lain sebagai berikut :

- ✓ Kelebihan pembayaran (dobel bayar) listrik Kantor Wilker Tulehu bulan Oktober 2025, senilai Rp251.472, dengan Nomor NTB : 041581440950 dan Nomor NTPN : 557A61JNG80OU5M5 tanggal 21 Januari 2025.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (42)  
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	2025	2024	%
Penerimaan Perpajakan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,121,119	2,407,769	195.76
Penerimaan Hibah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7,121,119</b>	<b>2,407,769</b>	<b>195.76</b>

Total dari pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai Rp7.121.119. Dari tabel perbandingan diatas terlihat adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 195,76%, dikarenakan terdapat Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) dan Pendapatan Lain-lain (4259).

*Realisasi Belanja* **B.2 Belanja**

*Negara*

*Rp17.552.716.179*

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Ambon TA. 2025 yaitu sebesar Rp17.552.716.179 atau 92,92% dari anggaran belanja sebesar Rp18.889.373.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
sampai dengan 31 Desember 2025*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8,419,051,000	8,397,536,545	99.74
Belanja Barang	10,470,322,000	9,155,179,830	87.44
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>18,889,373,000</b>	<b>17,552,716,375</b>	<b>92.92</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	-	196	
<b>Jumlah</b>	<b>18,889,373,000</b>	<b>17,552,716,179</b>	<b>92.92</b>

Realisasi anggaran menurut jenis belanja pada tabel diatas, memperlihatkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2025 penyerapan anggaran sebesar 92,92%.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	%
Belanja Pegawai	8,397,536,349	7,758,000,150	8.24
Belanja Barang	9,155,179,830	16,050,939,309	(42.96)
Belanja Modal	-	1,567,020,358	(100.00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>17,552,716,179</b>	<b>25,375,959,817</b>	<b>(30.83)</b>

Secara keseluruhan realisasi belanja hingga 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 30,83%. Hal ini dikarenakan tidak terdapat realisasi belanja modal pada tahun 2025.

Pagu anggaran yang bersumber dari PNBPN yaitu Logistik Kapal Pengawas antara lain pelumas, BBM, biaya delegasi, dan ongkos angkut BBM Kapal Pengawas KP. Hiu 13. Alokasi pagu (100%) senilai Rp2.471.816.000, dengan alokasi Maksimum Pencairan (MP) Tahap I sebanyak 60%, yaitu senilai Rp1.561.122.000, berdasarkan Surat Persetujuan Maksimum Pencairan PNBPN Tahap I TA 2025, Nomor S-211/PB.2/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan PNBPN Tahap I TA 2025 pada Satker Lingkup DJPT dan DJPSDKP KKP yang dikeluarkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran, Kementerian Keuangan.

*Belanja Pegawai  
Rp8.397.536.349*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun PSDKP Ambon TA. 2025 dan TA. 2024 sebesar Rp8.397.536.349 dan Rp7.758.000.150. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai pada Stasiun PSDKP terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang pegawai PNS, 26 (dua puluh enam) orang pegawai PPPK, dan 9

(sembilan) orang pegawai PPPK paruh waktu. Dibandingkan dengan periode Desember 2024, realisasi belanja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 8,24% dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya 9 (sembilan) orang pegawai PPPK dan adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2025 dan TA. 2024  
(dalam Rupiah)*

URAIAN BELANJA	2025	2024	%
Gaji Pokok PNS	2,389,580,500	2,374,936,500	0.62
Pembulatan Gaji PNS	35,886	37,242	(3.64)
Tunj. Suami/Istri PNS	176,815,880	174,606,570	1.27
Tunj. Anak PNS	57,811,700	56,468,412	2.38
Tunj. Struktural PNS	12,060,000	12,600,000	(4.29)
Tunj. Fungsional PNS	39,110,000	40,180,000	(2.66)
Tunj. PPh PNS	11,851,622	10,512,940	12.73
Tunj. Beras PNS	142,667,400	143,391,600	(0.51)
Uang Makan PNS	299,613,000	250,336,000	19.68
Tunjangan Umum PNS	87,380,000	90,390,000	(3.33)
Gaji Pokok PPPK	786,977,100	660,969,200	19.06
Pembulatan Gaji PPPK	14,394	14,460	(0.46)
Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,946,200	38,764,560	15.95
Tunjangan Anak PPPK	9,021,458	6,160,080	46.45
Tunjangan Fungsional PPPK	60,540,000	56,640,000	6.89
Tunjangan Beras PPPK	41,206,980	33,313,200	23.70
Uang Makan PPPK	75,670,000	65,261,000	15.95
Tunjangan Umum PPPK	4,560,000	0	0.00
Uang Lembur	149,647,000	60,601,000	146.94
Uang Lembur PPPK	56,101,000	39,706,000	41.29
Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,910,554,074	2,782,524,026	4.60
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,041,372,351	867,878,770	19.99
<b>Jumlah Kotor</b>	<b>8,397,536,545</b>	<b>7,765,291,560</b>	<b>8.14</b>
Pengembalian Belanja	196	7,291,410	(100.00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8,397,536,349</b>	<b>7,758,000,150</b>	<b>8.24</b>

Hingga 31 Desember 2025 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp196 berupa belanja pembulatan Gaji PNS pada belanja pegawai Stasiun PSDKP Ambon.

*Belanja Barang  
Rp9.155.179.830*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.155.179.830 dan Rp16.050.939.309.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang*

*Per 31 Desember 2025 dan 2024*

*(dalam rupiah)*

URAIAN	2025	2024	%
Belanja Barang Operasional (5211)	1,143,183,653	1,448,856,357	(21.10)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	5,981,839,009	8,252,726,533	(27.52)
Belanja Barang Persediaan (5218)	22,864,600	115,667,370	(80.23)
Belanja Jasa (5221)	424,646,586	688,826,589	(38.35)
Belanja Pemeliharaan (5231)	1,064,470,593	2,330,600,778	(54.33)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	518,175,389	3,160,754,632	(83.61)
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	0	60,903,050	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9,155,179,830</b>	<b>16,058,335,309</b>	<b>(42.99)</b>
Pengembalian Belanja	0	7,396,000	0.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9,155,179,830</b>	<b>16,050,939,309</b>	<b>(42.96)</b>

- Belanja barang operasional (5211) sebesar Rp1.143.183.653 terdiri dari : belanja untuk keperluan perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat dinas pos pusat, dan honor operasional satuan kerja.
- Belanja barang non operasional (5212) sebesar Rp5.981.839.009 antara lain belanja bahan seperti cetak laporan, BBM, pelumas, air tawar kapal pengawas, belanja honor output kegiatan serta belanja barang non operasional lainnya.
- Belanja barang persediaan barang konsumsi (5218) sebesar Rp22.864.600 meliputi belanja ATK, bahan komputer, jurnal deck dan jurnal mesin.
- Belanja barang jasa (5221) sebesar Rp424.646.586 meliputi belanja langganan listrik, telepon, air, belanja sewa, belanja jasa lainnya, belanja jasa profesi untuk menunjang kegiatan dan belanja jasa lainnya.
- Belanja pemeliharaan (5231) sebesar Rp1.064.470.593, yang dilakukan untuk menjaga nilai aset-aset yang ada di Stasiun PSDKP Ambon antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan, kapal pengawas dan *speedboat/rubberboat* pengawasan, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta belanja persediaan pemeliharaan peralatan

dan mesin.

- Belanja perjalanan dalam negeri (5241) sebesar Rp518.175.389 meliputi kegiatan pembayaran belanja perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar kota.

Untuk pemakaian bahan bakar minyak (BBM) pada Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan Hiu 13 pada periode akhir Desember 2025 terdapat sisa bahan bakar minyak berjenis Dexlite yang memiliki sisa BBM sebanyak ±7.545 Liter dengan nilai Rp148.317.724 yang mengikuti acuan harga per-liter nya untuk wilayah 4 (Indonesia Timur) Rp19.658.

Realisasi belanja barang pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 42,96% dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pagu anggaran.

#### *Belanja Modal Rp0* **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.567.020.358. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang membeli manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 2024 (dalam Rupiah)*

URAIAN	2025	2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)	0	1,034,120,500	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331)	0	291,671,125	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (5341)	0	241,228,733	(100.00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>1,567,020,358</b>	<b>(100.00)</b>
Pengembalian	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>1,567,020,358</b>	<b>(100.00)</b>

Tidak terdapat belanja modal pada Stasiun PSDKP Ambon. Perbandingan nilai belanja Modal hingga 31 Desember 2025 dan 2024 pada tabel diatas, memperlihatkan adanya penurunan realisasi yang signifikan terutama pada belanja modal peralatan dan mesin

dikarenakan adanya efisiensi pagu anggaran belanja (pemblokiran akun 53).

*Belanja Modal Tanah Rp0*

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Stasiun PSDKP Ambon TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan lalu.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah  
31 Desember 2025 dan 2024*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	2025	2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Sawah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0*

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.034.120.500. Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin hingga 31 Desember 2025. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	2025	2024	%
Peralatan dan Mesin	0	1,034,120,500	(100.00)
Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>1,034,120,500</b>	<b>(100.00)</b>
Pengembalian	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>1,034,120,500</b>	<b>(100.00)</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0*

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA. 2025 dan TA. 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp291.671.125. Tidak terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	2025	2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	237,369,925	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	54,301,200	
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	<b>291,671,125</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja	-	-	0
<b>Jumlah Belanja</b>	-	<b>291,671,125</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0*

**B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp241.228.733. Tidak terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan di Stasiun PSDKP Ambon hingga periode 31 Desember 2025. Rincian realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	2025	2024	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	198,752,363	(100.00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	42,476,370	(100.00)
Belanja Modal Irigasi	0	0	0.00
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>241,228,733</b>	<b>0.00</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>241,228,733</b>	<b>0.00</b>

*Belanja Modal Lainnya Rp0*

**B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Bantuan  
Sosial Rp0*

**B.5.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2025 dan TA. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Aset Lancar*  
*Rp527.070.650*

### C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp527.070.650 dan Rp472.635.880.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di*  
*Bendahara*  
*Pengeluaran*  
*Rp0*

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

Keterangan	2025	2024
Saldo UP	0	0
Kwitansi UP belum SPJ	0	0
Saldo TUP	0	0
Kwitansi TUP belum SPJ	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Dibayar*  
*di Muka*  
*Rp10.500.000*

#### C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Nilai Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.500.000 dan Rp16.000.000. Belanja dibayar dimuka merupakan hak masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang dan jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja dibayar dimuka antara lain sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA. 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nominal (Rp)
1	Sewa bangunan kantor Wilker Masohi masa kontrak terhitung mulai tanggal 29 Juli 2025 s.d 28 Juli 2026 dengan No. SPK B.1530/PSDKPSta.7/KU.430/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025	10,500,000
<b>Total</b>		<b>10,500,000</b>

Persediaan

Rp516.570.650

**C.1.3. Persediaan**

. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp516.570.650 dan Rp456.635.880, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA. 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Barang	2025	2024
Barang Konsumsi	9,002,040	19,782,670
Suku Cadang	507,568,610	436,853,210
<b>Jumlah</b>	<b>516,570,650</b>	<b>456,635,880</b>

Berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Persediaan Stasiun PSDKP Ambon Nomor : B.2934/PSDKPSta.7/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Persediaan barang konsumsi sebesar Rp9.002.040, Persediaan suku cadang sebesar Rp507.568.610 yang merupakan persediaan berasal dari suku cadang kapal pengawas Hiu 13 dan speedboat Napoleon dan Tenggiri milik Stasiun PSDKP Ambon.

Rincian Mutasi Persediaan

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>456,635,880</b>
Mutasi tambah :	269,011,910
Pembelian	269,011,910
Mutasi Kurang :	(209,077,140)
Habis Pakai	(209,077,140)
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2025</b>	<b>516,570,650</b>

## Aset Tetap

Rp20.521.296.373

3

## C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kementerian Akuntansi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp20.521.296.373 dan Rp23.583.841.941.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Stasiun PSDKP Ambon berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

## Tanah

Rp6.248.730.383

### C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.248.730.383 dan Rp6.248.730.383. Mutasi aset tetap tanah adalah sebagai berikut :

#### Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>6.248.730.383</b>
Mutasi tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>6.248.730.383</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>6.248.730.383</b>

Saldo Tanah pada Stasiun PSDKP Ambon per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.248.730.383 yang terdiri dari tanah seluas 5.838 m<sup>2</sup>. Rincian data Tanah berdasarkan letak dan peruntukannya adalah sebagai berikut :

#### Rincian Daftar Tanah

No	Lokasi/Alamat Aset Tanah	Luasan (m <sup>2</sup> )	Bukti Kepemilikan	Pengguna
1	Dwi Warna, Kec. Banda, Kab. Maluku Tengah	572	SHP No. 00006	Satwas SDKP SBT
2	Jl. Ir. Putuhena, Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon	5266	SHP No. 45 & 46	Stasiun PSDKP Ambon

Peralatan dan  
Mesin  
Rp44.797.426.69  
5

## C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp44.797.426.695 dan Rp45.677.071.631 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>45,677,071,631</b>
Mutasi tambah :	25,490,000
Trasnfer Masuk (102)	25,490,000
Mutasi Kurang :	(905,134,936)
Transfer Keluar (302)	(22,529,000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	(882,605,936)
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>44,797,426,695</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	37,837,089,098
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>6,960,337,597</b>

Saldo perolehan nilai per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp45.665.432.631. Saldo mengalami perubahan dengan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang antara lain sebagai berikut :

- ✓ Mutasi tambah sebesar Rp25.490.000 yang terdiri atas :
  - Transfer Masuk senilai Rp25.490.000 berupa 1 (satu) unit Lap top sebesar Rp15.500.000 dan 1 (satu) unit Tablet PC dengan nilai sebesar Rp9.990.000 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor B.1117/PSDKPSta.5/PL.450/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- ✓ Mutasi kurang sebesar Rp905.134.936, yang terdiri atas :
  - Transfer keluar senilai Rp 22.529.000 berupa 1 (satu) unit Lap Top sebesar Rp12.999.000 dan 1 (satu) unit Tablet PC 1 dengan nilai sebesar Rp9.530.000 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor B.920/PSDKPSta.7/PL.450/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.
  - Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp882.605.936 antara lain berupa :
    - Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor B.1777/PSDKPSta.7/PL.450/IX/2025 tanggal 2 Desember 2025 terdapat 44 (empat puluh empat) jenis barang,

dan berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor B.1275/PSDKPSta.7/PL.450/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 terdapat 1 jenis barang, terdiri atas :

No	Nama Barang	Nominal	Qty (unit)
1	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	11,564,586	1
2	Global Positioning System	44,839,000	9
3	Water Quality Checker	14,264,585	1
4	Lemari Besi/Metal	67,602,616	20
5	Lemari Kayu	23,900,000	11
6	Rak Kayu	2,000,000	1
7	Filing Cabinet Besi	31,679,675	13
8	Kardex Besi	2,000,000	2
9	Papan Visual/Papan Nama	3,300,000	1
10	LCD Projector/Infocus	25,198,000	2
11	Meja Kerja Kayu	29,230,000	14
12	Kursi Besi/Metal	17,670,000	6
13	Meja Rapat	9,240,000	6
14	Kursi Fiber Glas/Plastik	5,940,000	4
15	Meubelair	20,000,000	1
16	Mesin Pemotong Rumput	2,715,000	1
17	Alat Pembersih Lainnya	1,100,000	1
18	Lemari Es	14,700,000	4
19	AC Split	36,190,000	8
20	Kompas Gas (Alat Dapur)	600,000	1
21	TV	45,806,000	11
22	Sound System	9,515,000	1
23	Tiang Bendera	1,199,000	1
24	Dispenser	2,475,000	1
25	Tangki air	2,350,000	1
26	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10,560,000	6
27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7,717,000	1
28	Camera Under Water	17,370,586	2
29	Teropong/Keker	8,030,000	3
30	Pesawat Telephone	2,500,000	1
31	PC	157,981,104	18
32	Laptop	59,581,089	6
33	Notebook	13,548,700	1
34	Tablet PC	13,838,400	2
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	46,474,021	14
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10,502,100	2
37	External/ Portable Hardisk	1,845,000	2
38	Alat Selam Seet	74,260,000	2
39	Wet Suit	5,661,000	2
40	Snorkel	661,760	1
41	Regulator	8,447,989	1
42	Clip, Selang & Octopus	2,529,945	1
43	Sepatu Katak, Baju Selam Kering / Dry Suite	858,000	1
44	Sepatu Katak Baju Selam Basah (Wet Suite)	560,780	1
45	Sepeda Motor	14,600,000	1
<b>Total</b>		<b>882,605,936</b>	

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp7.580.062.080*

### **C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp7.580.062.080 dan Rp7.288.390.955. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>7,580,062,080</b>
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>7,580,062,080</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	954,533,540
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>6,625,528,540</b>

Tidak terdapat transaksi mutasi penambahan dan pengurangan pada gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2025.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp836.498.084*

**C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp836.498.084 dan Rp836.498.084. Rincian mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>836,498,084</b>
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>836,498,084</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	149,798,231
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>686,699,853</b>

Tidak terdapat transaksi mutasi penambahan dan pengurangan pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan hingga 31 Desember 2025.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan Rp0*

**C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp239.903.713.

Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>239,903,713</b>
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang :	(239,903,713)
Penghapusan/Penghentian Permanen KDP	(239,903,713)
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>

Terdapat transaksi mutasi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan hingga 31 Desember 2025. Jumlah KDP Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0

dengan status telah dihapuskan dengan rincian sebagai berikut, antara lain:

- Transaksi KDP yang telah dihapuskan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1310/KEPMEN-KP/PL.750/VIII/2025 senilai Rp239.903.713 dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk melanjutkan pembangunan adalah sebagai berikut :
  - o Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Mess Pimpinan dengan NUP 5 senilai Rp43.035.300 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
  - o Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Gudang Logistik, dengan NUP 6 senilai Rp42.896.713 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
  - o Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Pos Pengawasan PSDKP Seram Bagian Timur dengan NUP 7 senilai Rp97.737.550 dengan progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen);
  - o Perencanaan Gedung dan Bangunan Pembangunan Mess Operator Satwas PSDKP Seram Bagian Timur dengan NUP 8 senilai Rp56.234.150 progres pekerjaan Perencanaan sudah mencapai 100 % (seratus persen).

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(38.941.420.869)*

#### **C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing - masing Rp(38.941.420.869) dan Rp(36.998.423.950). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6,248,730,383	0	6,248,730,383
2	Peralatan dan Mesin	44,797,426,695	(37,837,089,098)	82,634,515,793
3	Gedung dan bangunan	7,580,062,080	(954,533,540)	8,534,595,620
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	836,498,084	(149,798,231)	986,296,315
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>59,462,717,242</b>	<b>(38,941,420,869)</b>	<b>98,404,138,111</b>

Aset Lainnya  
Rp0

### C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kementerian Akuntansi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kementerian Akuntansi terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Lain-Lain  
Rp868.005.936

#### C.3.1. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp868.005.936 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Rincian Mutasi Aset Lain – Lain TA. 2025

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah :	882,605,936
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	882,605,936
Mutasi Kurang :	(14,600,000)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(14,600,000)
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>	<b>868,005,936</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(868,005,936)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>

Terdapat transaksi mutasi tambah dan kurang pada Aset lain – lain hingga 31 Desember 2025. Saldo perolehan nilai per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.

- ✓ Mutasi tambah sebesar Rp882.605.936 berupa penghentian aset dari penggunaan, antara lain sebagai berikut :

No	Nama Barang	Nominal	Qty (unit)
1	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	11,564,586	1
2	Global Positioning System	44,839,000	9
3	Water Quality Checker	14,264,585	1
4	Lemari Besi/Metal	67,602,616	20
5	Lemari Kayu	23,900,000	11
6	Rak Kayu	2,000,000	1
7	Filing Cabinet Besi	31,679,675	13
8	Kardex Besi	2,000,000	2
9	Papan Visual/Papan Nama	3,300,000	1
10	LCD Projector/Infocus	25,198,000	2
11	Meja Kerja Kayu	29,230,000	14
12	Kursi Besi/Metal	17,670,000	6
13	Meja Rapat	9,240,000	6
14	Kursi Fiber Glas/Plastik	5,940,000	4
15	Meubelair	20,000,000	1
16	Mesin Pemotong Rumput	2,715,000	1
17	Alat Pembersih Lainnya	1,100,000	1
18	Lemari Es	14,700,000	4
19	AC Split	36,190,000	8
20	Kompas Gas (Alat Dapur)	600,000	1
21	TV	45,806,000	11
22	Sound System	9,515,000	1
23	Tiang Bendera	1,199,000	1
24	Dispenser	2,475,000	1
25	Tangki air	2,350,000	1
26	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10,560,000	6
27	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7,717,000	1
28	Camera Under Water	17,370,586	2
29	Teropong/Keker	8,030,000	3
30	Pesawat Telephone	2,500,000	1
31	PC	157,981,104	18
32	Laptop	59,581,089	6
33	Notebook	13,548,700	1
34	Tablet PC	13,838,400	2
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	46,474,021	14
36	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10,502,100	2
37	External/ Portable Hardisk	1,845,000	2
38	Alat Selam Seet	74,260,000	2
39	Wet Suit	5,661,000	2
40	Snorkel	661,760	1
41	Regulator	8,447,989	1
42	Clip, Selang & Octopus	2,529,945	1
43	Sepatu Katak, Baju Selam Kering / Dry Suite	858,000	1
44	Sepatu Katak Baju Selam Basah (Wet Suite)	560,780	1
45	Sepeda Motor	14,600,000	1
<b>Total</b>		<b>882,605,936</b>	

- ✓ Mutasi kurang sebesar Rp14.600.000 yaitu Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan berupa 1 (satu) NUP Sepeda Motor dengan nilai

sebesar Rp14.600.000 dan saat ini sedang dalam proses pengajuan penerbitan SK Penghapusan.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(868.005.936)*

**C.3.2. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(868.005.936) dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Kewajiban  
Jangka Pendek  
Rp836.500*

**C.4. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kementerian Akuntansi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp836.500 dan Rp5.675.171.

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp836.500*

**C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp836.500 dan Rp5.675.171 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga pada Stasiun PSDKP Ambon berupa Belanja pegawai dan belanja barang yang masih harus dibayar. Berikut rincian Utang kepada pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

*Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga*

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nominal
<b>Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111)</b>		<b>777,000</b>
1	Belanja Pegawai berupa Belanja Uang Makan PPPK a.n Maidah Marasabessy bulan Desember 2025	777,000
<b>Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112)</b>		<b>59,500</b>
1	Biaya langganan air kantor Satwas SDKP Morotai - Wilker Tobelo bulan Desember 2025	59,500
<b>Total</b>		<b>836,500</b>

*Utang Yang  
Belum  
Ditagihkan  
Rp0*

#### **C.4.2. Utang Yang Belum Ditagihkan**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Pada Stasiun PSDKP Ambon, utang yang belum ditagihkan berupa kwitansi UP yang belum di SPJ-kan.

*Uang Muka dari  
KPPN Rp0*

#### **C.4.3. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas  
Rp21.047.530.523*

#### **C.5. Ekuitas**

Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.047.530.523 dan Rp24.050.802.650. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan  
PNBP Rp0*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan penerimaan negara bukan pajak sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.494.000. Tidak terdapat pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan 31 Desember 2025.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

*(dalam rupiah)*

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,494,000	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>1,494,000</b>	<b>0</b>

*Beban Pegawai  
Rp8.395.632.178*

### D.2 Pegawai

Jumlah beban Pegawai Stasiun PSDKP Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp8.395.632.178 dan Rp7.760.385.321. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Gaji Pokok PNS	2,388,453,000	2,376,064,000	0.52
Pembulatan Gaji PNS	35,690	36,006	(0.88)
Tunj. Suami/Istri PNS	176,703,130	174,719,320	1.14
Tunj. Anak PNS	57,766,600	56,513,512	2.22
Tunj. Struktural PNS	12,060,000	12,600,000	(4.29)
Tunj. Fungsional PNS	39,110,000	40,180,000	(2.66)
Tunj. PPh PNS	11,851,622	10,512,940	12.73
Tunj. Beras PNS	142,667,400	143,391,600	(0.51)
Uang Makan PNS	299,613,000	250,040,000	19.83
Tunjangan Umum PNS	87,380,000	90,030,000	(2.94)
Gaji Pokok PPPK	786,977,100	660,969,200	19.06
Pembulatan Gaji PPPK	14,394	14,286	0.76
Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,946,200	38,764,560	15.95
Tunjangan Anak PPPK	9,021,458	6,160,080	46.45
Tunjangan Fungsional PPPK	60,540,000	56,640,000	6.89
Tunjangan Beras PPPK	41,206,980	33,313,200	23.70
Uang Makan PPPK	76,447,000	58,331,000	31.06
Tunjangan Umum PPPK	4,560,000	-	-
Uang Lembur	149,647,000	60,601,000	146.94
Uang Lembur PPPK	56,101,000	39,706,000	41.29
Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,909,158,253	2,783,919,847	4.50
Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK	1,041,372,351	867,878,770	19.99
<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>8,395,632,178</b>	<b>7,760,385,321</b>	<b>8.19</b>

Rincian Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai  
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	Beban	Belanja	Selisih D=C-B	Pengembalian	F=E-D
A	B	C	D	E	F
Gaji Pokok PNS	2,388,453,000	2,389,580,500	1,127,500	-	(1,127,500)
Pembulatan Gaji PNS	35,690	35,886	196	196	-
Tunj. Suami/Istri PNS	176,703,130	176,815,880	112,750	-	(112,750)
Tunj. Anak PNS	57,766,600	57,811,700	45,100	-	(45,100)
Tunj. Struktural PNS	12,060,000	12,060,000	-	-	-
Tunj. Fungsional PNS	39,110,000	39,110,000	-	-	-
Tunj. PPh PNS	11,851,622	11,851,622	-	-	-
Tunj. Beras PNS	142,667,400	142,667,400	-	-	-
Uang Makan PNS	299,613,000	299,613,000	-	-	-
Tunjangan Umum PNS	87,380,000	87,380,000	-	-	-
Gaji Pokok PPPK	786,977,100	786,977,100	-	-	-
Pembulatan Gaji PPPK	14,394	14,394	-	-	-
Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,946,200	44,946,200	-	-	-
Tunjangan Anak PPPK	9,021,458	9,021,458	-	-	-
Tunjangan Fungsional PPPK	60,540,000	60,540,000	-	-	-
Tunjangan Beras PPPK	41,206,980	41,206,980	-	-	-
Uang Makan PPPK	76,447,000	75,670,000	(777,000)	-	777,000
Tunjangan Umum PPPK	4,560,000	4,560,000	-	-	-
Uang Lembur	149,647,000	149,647,000	-	-	-
Uang Lembur PPPK	56,101,000	56,101,000	-	-	-
Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,909,158,253	2,910,554,074	1,395,821	-	(1,395,821)
Belanja Pegawai Tunja ngan Khusus/Kegiatan/Kin erja PPPK	1,041,372,351	1,041,372,351	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8,395,632,178</b>	<b>8,397,536,545</b>	<b>1,904,367</b>	<b>196</b>	<b>(1,904,171)</b>

Terdapat selisih antara belanja pegawai pada LRA dengan beban pegawai pada LO yaitu sebesar Rp1.904.171, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Penjelasan Selisih Realisasi Pegawai dan Beban Pegawai  
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Jurnal balik atas belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - gaji pokok PNS	(1,127,500)
Jurnal balik atas belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - tunj. Suami/istri PNS	(112,750)
Jurnal balik atas belanja Pegawai berupa kekurangan gaji a.n Puji Winarno bulan Januari 2024 s/d November 2024 - tunj anak PNS	(45,100)
Jurnal balik atas belanja Pegawai berupa kekurangan tunjangan kinerja a.n Rizqi Tatri Kusuma bulan November 2024	(1,395,821)
Belanja Pegawai berupa Belanja Uang Makan PPPK a.n Maidah Marasabessy bulan Desember 2025	777,000
<b>Jumlah</b>	<b>(1,904,171)</b>

*Beban*

*Persediaan*

*Rp33.645.230*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.645.230 dan Rp153.992.397. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)*

URAIAN BEBAN	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	33,645,230	153,992,397	(78)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>33,645,230</b>	<b>153,992,397</b>	<b>(78)</b>

*Beban Barang*

*dan Jasa*

*Rp7.552.234.748*

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.552.234.748 dan Rp10.393.501.096. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	%
Keperluan Perkantoran	984,152,708	1,217,184,357	(19.15)
Penambah Daya Tahan Tubuh	79,793,295	120,954,200	(34.03)
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,157,650	16,705,800	(45.18)
Honor Operasional Satuan Kerja	70,080,000	94,012,000	(25.46)
Bahan	5,335,930,630	7,336,298,728	(27.27)
Barang Non Operasional Lainnya	645,908,379	916,427,805	(29.52)
Langganan Listrik	116,589,792	158,229,934	(26.32)
Langganan Telepon	82,008,294	109,506,070	(25.11)
Langganan Air	27,702,000	49,036,800	(43.51)
Sewa	61,757,600	147,422,666	(58.11)
Jasa Profesi	1,100,000	18,500,000	(94.05)
Jasa Lainnya	138,054,400	209,222,736	(34.02)
<b>Jumlah</b>	<b>7,552,234,748</b>	<b>10,393,501,096</b>	<b>(27.34)</b>

*Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa TA. 2025*

*(dalam rupiah)*

URAIAN	Beban	Belanja	Selisih D=C-B	Pengembalian	F=E-D
A	B	C	D	E	F
Keperluan perkantoran	984,152,708	984,152,708	-	-	-
Penambah daya tahan tubuh	79,793,295	79,793,295	-	-	-
Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,157,650	9,157,650	-	-	-
Honor Operasional Satuan Kerja	70,080,000	70,080,000	-	-	-
Bahan	5,335,930,630	5,335,930,630	-	-	-
Barang Non Operasional Lainnya	645,908,379	645,908,379	-	-	-
Langganan Listrik	116,589,792	118,532,292	1,942,500	-	(1,942,500)
Langganan Telpon	82,008,294	82,008,294	-	-	-
Langganan Air	27,702,000	28,694,000	992,000	-	(992,000)
Sewa	61,757,600	56,257,600	(5,500,000)	-	5,500,000
Jasa Profesi	1,100,000	1,100,000	-	-	-
Jasa Lainnya	138,054,400	138,054,400	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7,552,234,748</b>	<b>7,549,669,248</b>	<b>(2,565,500)</b>	<b>-</b>	<b>2,565,500</b>

Terdapat selisih antara belanja barang dan jasa pada LRA dengan beban barang dan jasa pada LO yaitu sebesar Rp2.565.500, yang terdiri dari langganan listrik senilai Rp1.942.500, langganan air senilai Rp992.000, dan sewa senilai Rp5.500.000, dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Penjelasan Selisih Belanja dan Beban Langganan Listrik  
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Jurnal balik atas biaya langganan listrik darat Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Ambon bulan Desember 2024	(1,942,500)
<b>Jumlah</b>	<b>(1,942,500)</b>

*Rincian Penjelasan Selisih Belanja dan Beban Langganan Air  
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Jurnal balik atas biaya langganan air Kantor Stasiun PSDKP Ambon (Wailela), Kantor Satwas Ternate, kantor Satwas SDKP Wilker Tobelo, kantor Satwas SDKP Wilker Masohi, dan kantor Satwas SDKP Wilker Banda bulan Desember 2024	(1,051,500)
Biaya langganan air kantor Satwas SDKP Morotai - Wilker Tobelo bulan Desember 2025	59,500
<b>Jumlah</b>	<b>(992,000)</b>

*Rincian Penjelasan Selisih Belanja dan Beban Sewa  
(dalam rupiah)*

URAIAN	NOMINAL
Jurnal balik atas sewa Bangunan Gudang Arsip senilai Rp8.000.000 masa kontrak terhitung mulai tanggal 01 Mei 2024 s.d 30 April 2025.	8,000,000
Jurnal balik atas belanja Sewa bangunan kantor Wilker Masohi senilai Rp8.000.000 masa kontrak terhitung mulai tanggal 29 Juli 2024 s.d 28 Juli 2025	8,000,000
Sewa bangunan kantor Wilker Masohi masa kontrak terhitung mulai tanggal 29 Juli 2025 s.d 28 Juli 2026 dengan No. SPK B.1530/PSDKPSta.7/KU.430/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025	(10,500,000)
<b>Jumlah</b>	<b>5,500,000</b>

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp993.755.193*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp993.755.193 dan Rp2.389.981.540. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143,555,620	513,392,476	(72.04)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	674,767,663	1,097,805,312	(38.53)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0.00
Beban Persediaan Suku Cadang	175,431,910	778,783,752	(77.47)
<b>Jumlah</b>	<b>993,755,193</b>	<b>2,389,981,540</b>	<b>(58.42)</b>

*Beban Perjalanan Dinas* **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

*Dinas*

*Rp518.175.389*

Beban Perjalanan Dinas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp518.175.389 dan Rp3.214.261.682. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk hingga 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	485,868,890	2,446,404,063	(80.14)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,100,000	95,100,000	(84.12)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,400,000	46,939,000	(88.50)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,806,499	564,915,569	(97.91)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	-	60,903,050	(100.00)
<b>Jumlah</b>	<b>518,175,389</b>	<b>3,214,261,682</b>	<b>(83.88)</b>

*Beban Barang*

*untuk*

*Diserahkan*

*kepada*

*Masyarakat*

*Rp0*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan*

*Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial

merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp2.836.618.230*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.836.618.230 dan Rp3.162.368.964. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi hingga 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

*(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,639,506,765	2,968,174,209	(11.07)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	159,270,337	156,353,627	1.87
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	24,122,874	24,122,874	
Beban Penyusutan Irigasi	8,233,934	8,233,934	50.14
Beban Penyusutan Jaringan	5,484,320	5,484,320	(99.83)
<b>Jumlah</b>	<b>2,836,618,230</b>	<b>3,162,368,964</b>	<b>(10.30)</b>

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus/Defisit  
dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp(232.782.594)*

#### **D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing Rp(232.782.594) dan Rp1.867.769. Rincian Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	2025	2024	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6,060,000	1,446,269	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	239,903,713	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,061,119	421,500	152
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>(232,782,594)</b>	<b>1,867,769</b>	<b>(12,563.14)</b>

⇒ Pendapatan dari Pelepasan Aset senilai Rp6.060.000 berasal dari hasil lelang peralatan dan mesin, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Z No.Pol. DE 5024 LM dengan risalah Lelang Nomor 118/17.01/2025-01 tanggal 25 Desember 2025.

⇒ Beban pelepasan aset senilai Rp239.903.713 berasal dari penghapusan KDP yaitu 4 NUP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp239.903.713 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1310/KEPMEN-KP/PL.750/VIII/2025.

⇒ Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penerimaan Kembali belanja pegawai dan Belanja barang tahun anggaran yang lalu yaitu kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai, Uang Makan bulan Desember 2 (dua) orang pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala 6 (enam) orang pegawai senilai Rp1.061.119, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) senilai Rp809.647, antara lain sebagai berikut :
  - ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Yochni Anwar Idrus, S.St.Pi senilai Rp2.296, dengan Nomor

NTB : 806320500792 dan Nomor NTPN : 3884A3CIFTEM2DR5 tanggal 25 April 2025.

- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Rizqi Tatri Kusuma, S.PI senilai Rp20.879, dengan Nomor NTB : 377506487951 dan Nomor NTPN : B05C07QLV2AK3D3S tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Sunapit M. Taher senilai Rp1.504, dengan Nomor NTB : 128559484930 dan Nomor NTPN : 3CF806U8F7O7MCH5 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Nedyia Ibrahim, S.Pi senilai Rp517, dengan Nomor NTB : 033869482181 dan Nomor NTPN : ACC7D2G502S9LBS4 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Desember 2025 a.n Lukman Bugis senilai Rp37.000, dengan Nomor NTB : 397240469416 dan Nomor NTPN : FC17C48VVO12FVAT tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Lukman Bugis senilai Rp2.151, dengan Nomor NTB : 776700464172 dan Nomor NTPN : 2DBB07QLV2AK39UK tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Mohamad Asrar Kelian senilai Rp10.110, dengan Nomor NTB : 8494944613141 dan Nomor NTPN : 58EDC7QLV2AK397E tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Widyawati Rumakat, S.Pd.I senilai Rp1.053, dengan Nomor NTB : 091788446809 dan Nomor NTPN : AA61A6U8F7O7M892 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Mila Fransiska, S.Pi senilai Rp301, dengan Nomor NTB : 179348443404 dan Nomor NTPN : EEEF70NA0DNGR3GH tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Akadif Ode Ali, A.Md senilai Rp677, dengan Nomor NTB :

261760440480 dan Nomor NTPN : 8CFD455DFIJES22H tanggal 25 April 2025.

- ✓ Kelebihan pembayaran Uang Makan bulan Desember 2025 a.n Frans Doni Saraung, A.Md senilai Rp35.000, dengan Nomor NTB : 970009427064 dan Nomor NTPN : 17BD40NA0DNGQNI4 tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Muhammad Nur A Marsaoli, S.Pi senilai Rp7.003, dengan Nomor NTB : 279319423834 dan Nomor NTPN : 588B455DFIJERMJJ tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2025 a.n Tiara Sanla Wattimury, S.Pi senilai Rp882, dengan Nomor NTB : 361456420614 dan Nomor NTPN : C9FFB7QLV2AK2KJH tanggal 25 April 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2025 a.n M. Asri Umarela, senilai Rp106.400, dengan Nomor NTB : 973277590647 dan Nomor NTPN : 680121JNG83GLE6F tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2025 a.n Lukman Bugis, senilai Rp110.800, dengan Nomor NTB : 104576586679 dan Nomor NTPN : BF2502G502LT2DVF tanggal 13 Februari 2025.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2025 a.n Haryati Tianotak, senilai Rp124.200, dengan Nomor NTB : 600156602216 dan Nomor NTPN : 7D1992G502LT2DN3 tanggal 13 Februari 2025, senilai Rp124.200.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2025 a.n Taufik Kelibia, senilai Rp124.200, dengan Nomor NTB : 906351608889 dan Nomor NTPN : BA7466U8F7HR3DFH tanggal 13 Februari 2025, senilai Rp124.200.
- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2025 a.n a.n Haida Wardi, senilai Rp113.300, dengan Nomor NTB : 674090615249 dan Nomor NTPN : 674090615249 tanggal 13 Februari 2025.

- ✓ Kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bulan Desember 2025 a.n Abdul Halik Tuakia, senilai Rp111.100, dengan Nomor NTB : 851308618466 dan Nomor NTPN : 98CF461QVCVEMD0I tanggal 13 Februari 2025.
  - ✓ Potongan Lain-lain dari pembayaran kekurangan Gaji Berkala bulan Januari-November tahun 2024 untuk 1 Pegawai, sesuai SPP No. 00005T tanggal 13 Januari 2025, dan SPM no. 00005A tanggal 17 Januari 2025.
- 2) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912), antara lain sebagai berikut :
- ✓ Kelebihan pembayaran (dobel bayar) listrik Kantor Wilker Tulehu bulan Oktober 2025, senilai Rp251.472, dengan Nomor NTB : 041581440950 dan Nomor NTPN : 557A61JNG80OU5M5 tanggal 21 Januari 2025.

*Pos Luar Biasa*  
*Rp0*

#### **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **Ekuitas Awal**

**Rp24.050.802.650**

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon untuk periode 01 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.050.802.650 dan Rp25.756.367.465.

### **Surplus/Defisit**

**LO**  
**Rp(20.562.843.562)**

#### **E.2 Surplus/(Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(20.562.843.562) dan Rp(27.071.129.231). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### **Penyesuaian**

**Nilai Aset**  
**Rp0**

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### **Koreksi Nilai**

**Persediaan Rp0**

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

### **Selisih Revaluasi**

**Aset Tetap Rp0**

#### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

### **Koreksi Aset**

**Tetap Non**  
**Revaluasi Rp0**

#### **E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(6.496.332). Koreksi ini berasal dari transaksi

koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain -  
Lain Rp0*

### **E.3.5 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain Stasiun SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.700. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat koreksi lain-lain sampai dengan 31 Desember 2025.

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp17.559.571.4  
35*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas Stasiun Pengawasan SDKP Ambon sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp17.559.571.435 dan Rp25.372.058.048. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

*(dalam rupiah)*

<b>Transaksi Antar entitas</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	17,552,716,179	25,375,959,817
Diterima dari Entitas Lain	(7,121,119)	(3,901,769)
Transfer Masuk	20,366,250	0
Transfer Keluar	(6,389,875)	0
<b>Jumlah</b>	<b>17,559,571,435</b>	<b>25,372,058,048</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). sampai dengan 31 Desember 2025 , Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp(7.121.119) sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp17.552.716.179.

Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari penerimaan Kembali belanja pegawai

dan Belanja barang tahun anggaran yang lalu yaitu kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2024 sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai, Uang Makan bulan Desember oleh 2 (dua) orang pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala oleh 6 (enam) orang pegawai. Sedangkan rincian Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) yaitu realisasi dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp20.366.250 dan transfer keluar sebesar Rp6.389.875.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Rp0.

*Ekuitas Akhir*

*Rp21.047.530.5*

*23*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.047.530.523 dan Rp24.050.802.650.

## **F. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN - KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Revisi.**

##### **1. Revisi DIPA ke 01**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 22 Februari 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 0279-1805-7610-0557 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000.

Revisi ke-01 merupakan revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi 1 merupakan revisi *Efisiensi Anggaran* pada kode kegiatan 2350, 2352,2353, dan 2355.

##### **2. Revisi DIPA ke 02**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 tanggal 21 Maret 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2597-4105-4020-2019 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Revisi ke-02 merupakan revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. - Kode digital stamp mengalami perubahan.

Revisi ke 04 merupakan Revisi Revisi *Output Cadangan* yaitu pergeseran detail akun 2352.999.999.999.A.521211-Belanja Bahan Blokir Kode A 1 Paket 95.000.000 ke Akun 2352.QIC.002.051.H.521211-Belanja Bahan Blokir Kode A 1 Paket 95.000.000.

##### **3. Revisi DIPA ke 03**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 tanggal 14 April 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 8109-7274-0425-4050 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Kode *digital stamp* mengalami perubahan. Revisi ke-03 adalah revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan, yang merupakan revisi Operasional Kapal, Kantor, dan Armada PSDKP yang dirawat.

#### **4. Revisi DIPA ke 04**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 24 April 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 8109-7274-0425-4050 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp 21.112.804.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-04 adalah kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan Revisi ke 8 merupakan revisi pergeseran anggaran dan Revisi Halaman III DIPA.

#### **5. Revisi DIPA ke 05**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 23 Mei 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Kode digital stamp mengalami perubahan. Revisi ke-05 adalah revisi kewenangan DJA – Kementerian Keuangan, yang merupakan revisi buka blokir kode-2 pada kegiatan operasi kapal pengawas sumber dana PNBPN.

#### **6. Revisi DIPA ke 06**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 11 Juli 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-06 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN.

#### **7. Revisi DIPA ke 07**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 13 Oktober 2025, kode *Digital Stamp (DS)* : 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan), dengan Nilai Pagu Anggaran Rp21.112.804.000. Revisi ke-07 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi pemutakhiran RPD Halaman III DIPA pada aplikasi Sakti dan disesuaikan dengan aplikasi OMSPAN, serta hasil revisi POK.

#### **8. Revisi DIPA ke 08**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 31 Oktober 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-08 adalah revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan, yang merupakan revisi penambahan anggaran pada operasi Kapal Pengawas, serta penambahan detail akun pada kegiatan perjalanan dinas.

#### **9. Revisi DIPA ke 09**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 10 Desember 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-09 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi perubahan detail akun pada Belanja pegawai dan belanja barang.

#### **10. Revisi DIPA ke 10**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 10 Desember 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-10 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku, yang merupakan revisi perubahan detail akun pada kegiatan perjalanan dinas

#### **11. Revisi DIPA ke 11**

DIPA Satker Stasiun PSDKP Ambon (215141) Nomor: SP DIPA-032.05.2.215141/2025 Tanggal 30 Desember 2025, kode *Digital Stamp (DS)*: 2775-8072-8863-5900 (tidak mengalami perubahan) dengan Nilai Pagu Anggaran Rp18.889.373.000. Kode digital stamp tidak mengalami perubahan. Revisi ke-09 adalah revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi

Maluku, yang merupakan revisi perubahan detail akun pada belanja pegawai.

**b. Rekening Pemerintah dan NPWP Satuan Kerja**

Rekening pengeluaran satker Stasiun PSDKP Ambon yaitu pada Bank Mandiri Cabang Ambon dengan Nomor rekening **8100122151411000** a.n **BPG 061 STASIUN PSDKP AMBON**. NPWP Stasiun PSDKP Ambon Nomor **00.159.696.5-941.000** a.n Stasiun PSDKP Ambon Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

**c. Pagu Belanja berasal dari PNB**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-211/PB.2/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal Persetujuan Penetapan Maksimum Pencairan PNB Tahap I TA 2025 pada Satker Lingkup DJPT dan DJPSDKP KKP yang dikeluarkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran, Kementerian Keuangan, Stasiun PSDKP Ambon memperoleh sumber dana PNB pada belanja kegiatan 2350. Alokasi pagu (100%) senilai Rp2.471.816.000, dengan alokasi Maksimum Pencairan (MP) Tahap I sebanyak 60%, yaitu senilai Rp1.561.122.000 terdiri dari pembayaran pelumas, BBM, biaya delegasi, dan ongkos angkut BBM Kapal Pengawas KP. Hiu 13. Namun hanya Belanja BBM dan biaya delegasi yang terealisasi, dikarenakan tidak terdapat belanja pelumas dan pada ongkos angkut BBM menggunakan Rupiah Murni (RM). Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.556.620.000 atau mencapai 99,7% dari alokasi MP Tahap I. Rincian realisasi sebagai berikut :

*Rincian Realisasi Pagu PNB*

URAIAN	31 Desember 2025			
	Anggaran Keseluruhan (Rp)	Anggaran Alokasi MP Tahap I (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja bahan bakar (1 unit kapal)	2,267,753,000	1,561,122,000	1,454,580,000	
Belanja pelumas (1 unit kapal)	74,424,000		0	
Ongkos Angkut BBM	24,807,000		0	
Biaya Delegasi KP. Hiu 13	104,832,000		102,040,000	
<b>Jumlah</b>	<b>2,471,816,000</b>	<b>1,561,122,000</b>	<b>1,556,620,000</b>	<b>99.7</b>

Pagu anggaran Logistik Kapal Pengawas selain menggunakan PNBPN juga menggunakan pagu anggaran RM (Rupiah Murni) yang terdiri dari Belanja BBM dan ongkos angkut BBM dengan total pagu senilai Rp2.297.702.000, dan total realisasi hingga 31 Desember 2025 sebesar 99,9% atau senilai Rp3.457.743.000.

*Rincian Realisasi Pagu RM*

URAIAN	31 Desember 2025			
	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja bahan bakar (1 unit kapal)	2,270,602,000	3,411,851,000	3,407,694,000	99.9
Ongkos Angkut BBM	27,100,000	50,049,000	50,049,000	100.0
<b>Jumlah</b>	<b>2,297,702,000</b>	<b>3,461,900,000</b>	<b>3,457,743,000</b>	<b>99.9</b>

**d. Belanja BBM Kapal Pengawas Hiu 13**

Stasiun PSDKP Ambon memiliki 1 (satu) unit Kapal Pengawas yaitu Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan Hiu 13. Berkaitan dengan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) maka disampaikan tabel rincian Berita Acara Pemakaian Bahan Bakar pada periode Januari – Desember 2025, sebagai berikut :

*Rincian Berita Acara Pemakaian Bahan Bakar Minyak KP. Hiu 13 (satuan Liter)*

Bulan	Tanggal BBM Awal	Sisa Volume/ BBM Awal	Pengisian	Pemakaian	Sisa BBM Akhir
Januari	31 Des 24	3,950	-	370	3,580
Februari	31 Jan 25	3,580	-	450	3,130
Maret	28 Feb 25	3,130	-	450	2,680
April	27 Mar 25	2,680	10,000	980	11,700
Mei	30 Apr 25	11,700	24,000	21,390	14,310
Juni	31 Mei 25	14,310	-	560	13,750
Juli	30 Juni 25	13,750	-	730	13,020
Agustus	31 Juli 25	13,020	24,000	31,655	5,365
September	31 Agst 25	5,365	61,000	53,540	12,825
Oktober	30 Sept 25	12,825	28,000	32,837	7,988
November	30 Nov 25	7,988	49,000	55,668	1,320
Desember	31 Des 25	1,320	62,000	55,775	7,545
<b>Sisa akhir BBM</b>					<b>7,545</b>

Pada periode akhir Desember 2025, terdapat sisa bahan bakar minyak (BBM) berjenis Dexlite pada Kapal Pengawasan Kelautan dan Perikanan Hiu 13 yang memiliki sisa BBM sebanyak ±7.545 Liter

dengan nilai Rp148.317.724 yang mengikuti acuan harga per-liter nya untuk wilayah 4 (Indonesia Timur) sebesar Rp19.658.

#### e. Anggaran Prioritas Nasional

Pada Stasiun PSDKP Ambon terdapat pagu anggaran Prioritas Nasional senilai Rp8.020.791.000, dengan realisasi sejumlah Rp7.091.317.933. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing – masing Prioritas Nasional diantaranya adalah sebagai berikut :

Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Vol. RO	Progres Capaian (%)
2350	QHD	001	Operasi Kapal Pengawas	6,662,805,000	5,738,108,663	86.12	51	Operasi	51	100
2350	QHD	003	Operasi Speedboat Pengawas	304,053,000	302,413,175	99.46	10	Operasi	10	100
2352	RCG	'001	Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat	825,298,000	822,786,493	99.70	7	Unit	7	100
2352	QIC	001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	103,899,000	103,522,137	99.64	32	Lembaga	32	100
2353	QIC	002	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	124,736,000	124,487,465	99.80	9	Lembaga	23	100
<b>Jumlah</b>				<b>8,020,791,000</b>	<b>7,091,317,933</b>	<b>88.41</b>				<b>100</b>

#### f. Capaian Output Menurut Fungsi

Dalam Penjelasan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam sebelas fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial. Selanjutnya, fungsi-fungsi dirinci ke dalam subfungsi, Program, dan Kegiatan. Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Stasiun PSDKP Ambon terdapat

pada fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan dengan rincian sebagaimana terlampir :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tanggal : 27/01/20 7:55 AM  
SATUAN KERJA : 215141 STASIUN PSDKP AMBON Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_ftpg\_satker\_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=3/4	9=4-7
04	EKONOMI							
03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	8.263.611,000	7.792.156,000	6.863.308,331	0	6.863.308,331	88,08	928.847,669
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	256.615,000	94.385,000	93.508,027	0	93.508,027	99,07	876,973
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	781.747,000	249.140,000	248.204,202	0	248.204,202	99,02	935,798
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	300.000,000	0	0	0	0	null	0
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan</b>	<b>9.601.973,000</b>	<b>8.135.681,000</b>	<b>7.205.020,560</b>	<b>0</b>	<b>7.205.020,560</b>	<b>88,56</b>	<b>930.660,440</b>
WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11.510.831,000	10.753.692,000	10.347.695,815	190	10.347.695,815	96,22	403.996,381
	<b>JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen</b>	<b>11.510.831,000</b>	<b>10.753.692,000</b>	<b>10.347.695,815</b>	<b>190</b>	<b>10.347.695,815</b>	<b>96,22</b>	<b>403.996,381</b>
	<b>JUMLAH SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>	<b>21.112.804,000</b>	<b>18.889.373,000</b>	<b>17.592.716,375</b>	<b>190</b>	<b>17.592.716,179</b>	<b>92,92</b>	<b>1.336.096,821</b>
	<b>JUMLAH FUNGSI EKONOMI</b>	<b>21.112.804,000</b>	<b>18.889.373,000</b>	<b>17.592.716,375</b>	<b>190</b>	<b>17.592.716,179</b>	<b>92,92</b>	<b>1.336.096,821</b>

#### g. Berita Acara Inventarisasi BMN

Hingga periode 31 Desember 2025, Stasiun PSDKP Ambon telah menerbitkan 1 Berita Acara Inventarisasi BMN, sebagai berikut :

- Berita Acara Inventarisasi BMN dalam rangka penghapusan BMN nomor B. 1777/PSDKPSta.7/PL.450/IX/2025 tanggal 2 September 2025 sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) NUP peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp868.005.936.

#### h. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan  
Pada Satker Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2025*

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	6.248.730.383	0,00
2	Peralatan dan Mesin	45.665.432.631	0,00
3	Gedung dan Bangunan	7.580.062.080	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	836.498.084	0,00

5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.330.723.178</b>	<b>0</b>

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon adalah sebagai berikut :

*Daftar Surat Keputusan (SK) Penetapan Status Penggunaan Stasiun PSDKP Ambon Per 31 Desember 2025*

No	No SK	Tanggal SK	Aset yang di PSP	Nilai Aset (Rp)
1	218/KEMEMKP/SJ/PL.930/2019	15 Maret 2019	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	2.846.001.991,00
2	11/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	05 Maret 2019	Kendaraan	1.588.483.130,00
3	27/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	25 April 2019	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	130.412.000,00
4	20/KM.6/WKN.17/2019	09 Mei 2019	Speed Boat	6.614.803.767,00
5	195/KEMEMKP/SJ/PL.930/2019	13 Maret 2019	Bangunan Air	51.148.000,00
6	23/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	09 April 2019	Jalan Bangunan Air dan Jaringan di atas 100 jt	326.450.000,00
7	31/KM.6/WKN.17/KNL.01/2017	05 Juni 2017	Tanah	2.024.750.000,00
8	44/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	27 Juni 2019	Tanah	244.736.842,00
9	53/KM.6/WKN.17/KNL.01/2019	05 Agustus 2019	Gedung dan Bangunan	4.734.997.552,00
10	735/KEMENKP/SJ/PL.930/2019	30 Oktober 2019	Jalan, Bangunan Air dan Jaringan	122.805.500,00
11	31/KEPMENKP/SJ/PL.930/2020	30 Januari 2020	Alat dan Mesin dibawah 100 jt	242.263.160,00
12	120/KM.6/WKN.17/KNL.01/2020	23 Juli 2020	Kapal Pengawas Perikanan	29.431.253.750,00
13	174/KEPMENKP/SJ/PL.930/2021	12 April 2021	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	531.149.700,00
14	102/KM.6/WKN.17/KNL.01/2021	28 Juni 2021	Kendaraan	569.753.200,00
15	185/KM.6/WKN.17/KNL.01/2021	15 November 2021	Kendaraan	608.700.000,00
16	233/KEPMEN-KP/SJ/PL710/2022	19 April 2022	Alat dan Mesin di bawah 100 jt	428.085.430,00
17	20/KM.6/KNL.1701/2021	22 April 2022	Bangunn dan Gedung	3.905.701.955,00
18	915/KEPMENKP/SJ/PL.170/2022	21 November 2022	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	255.136.600,00
19	765/KEPMENKP/SJ/PL.170/2024	27 September 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	364.855.050,00
20	198/KM.6/KNL.1701/2024	13 Desember 2024	Kendaraan	48.790.018,00
21	482/KEPMENKP/SJ/PL.710/2024	22 Mei 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	224.767.071,00
22	716/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/2024	30 Juli 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	503.042.000
23	185/KM.6/KNL.1701/2024	26 September 2024	Alat dan Mesin diatas 100 jt	283.800.000
24	1113/KEPMEN-KP/PL.710/XI/2024	4 November 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	127.650.000

No	No SK	Tanggal SK	Aset yang di PSP	Nilai Aset (Rp)
25	1188/KEPMEN-KP/PL.710/XI/2024	13 November 2024	Alat dan Mesin dibawah 100 Jt	51.561.400
26	248/KM.6/KNL.1701/2024	16 Desember 2024	Jalan Lainnya	241.228.733
27	38/KM.6/KNL.1701/2025	11 Maret 2025	Gedung dan bangunan	291.671.125
28	409/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/III/2025	17 Maret 2025	Alsin	68.067.100

- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 38/KM.6/KNL.1701/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Penetapan Status Pengguna BMN sebanyak 2 (dua) NUP dengan nilai sebesar Rp291.671.125.
- Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 409/KEPMENKP/SJ/PL.710/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Status Pengguna BMN sebanyak 8 (delapan) NUP dengan nilai sebesar Rp68.067.100.

#### **i. Penghapusan BMN**

Hingga periode 31 Desember 2025, Stasiun PSDKP Ambon telah menerbitkan 2 SK Penghapusan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 38/KM.6/KNL.1701/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Penetapan Status Pengguna BMN sebanyak 2 (dua) NUP dengan nilai sebesar Rp291.671.125.
2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 409/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Status Pengguna BMN sebanyak 8 (delapan) NUP dengan nilai sebesar Rp68.067.100.

# **LAMPIRAN**

# **LAPORAN**

## **KEUANGAN :**

- **Laporan Utama :**
  - **Laporan Realisasi Anggaran (Face)**
  - **Neraca (Face)**
  - **Neraca Percobaan Akrual**
  - **Neraca Percobaan Kas**
  - **Laporan Operasional**
  - **Laporan Perubahan Ekuitas**
  
- **Laporan Tambahan :**
  - **LRA Belanja menurut Akun**
  - **LRA Pendapatan menurut Akun**
  - **Neraca Percobaan Akrual (Saldo Awal)**



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032  
**ESELON I** : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05  
**SATUAN KERJA** : STASIUN PSDKP AMBON 215141

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM  
Tgl Cetak : 04/05/26 12:17 PM  
Halaman : 2  
lap\_ira\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>18,889,373,000</b>	<b>17,552,716,179</b>	<b>(1,336,656,821)</b>	<b>93</b>	<b>32,362,728,000</b>	<b>25,375,959,817</b>	<b>6,986,768,183</b>	<b>78</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :  
FINAL

AMBON, 4 Mei 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

*[Signature]*  
JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA  
NIP. 198507012009011002



**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2100 ) MALUKU

SATUAN KERJA : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:23 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	10,500,000	16,000,000	(5,500,000)	(34.38)
Persediaan	516,570,650	456,635,880	59,934,770	13.13
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>527,070,650</b>	<b>472,635,880</b>	<b>54,434,770</b>	<b>11.52</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	6,248,730,383	6,248,730,383	0	0.00
Peralatan dan Mesin	44,797,426,695	45,677,071,631	(879,644,936)	(1.93)
Gedung dan Bangunan	7,580,062,080	7,580,062,080	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	836,498,084	836,498,084	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	239,903,713	(239,903,713)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(38,941,420,869)	(36,998,423,950)	(1,942,996,919)	5.25
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>20,521,296,373</b>	<b>23,583,841,941</b>	<b>(3,062,545,568)</b>	<b>(12.99)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lain-lain	868,005,936	0	868,005,936	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(868,005,936)	0	(868,005,936)	0.00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>21,048,367,023</b>	<b>24,056,477,821</b>	<b>(3,008,110,798)</b>	<b>(12.50)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	836,500	5,675,171	(4,838,671)	(85.26)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>836,500</b>	<b>5,675,171</b>	<b>(4,838,671)</b>	<b>(85.26)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>836,500</b>	<b>5,675,171</b>	<b>(4,838,671)</b>	<b>(85.26)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	21,047,530,523	24,050,802,650	(3,003,272,127)	(12.49)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21,047,530,523</b>	<b>24,050,802,650</b>	<b>(3,003,272,127)</b>	<b>(12.49)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21,047,530,523</b>	<b>24,050,802,650</b>	<b>(3,003,272,127)</b>	<b>(12.49)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>21,048,367,023</b>	<b>24,056,477,821</b>	<b>(3,008,110,798)</b>	<b>(12.50)</b>

Keterangan :

FINAL

AMBON, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA

NIP. 198507012009011002



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2100 ) MALUKU

SATUAN KERJA : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:25 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	10,500,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	9,002,040	0
0.0	117114	Suku Cadang	507,568,610	0
0.0	131111	Tanah	6,248,730,383	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	44,797,426,695	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,580,062,080	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	241,228,733	0
0.0	134112	Irigasi	377,598,000	0
0.0	134113	Jaringan	217,671,351	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	37,837,089,098
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	954,533,540
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	48,245,748
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	69,988,439
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	31,564,044
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	868,005,936	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	868,005,936
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	777,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	59,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,552,716,179
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,121,119	0
0.0	313211	Transfer Keluar	6,389,875	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	20,366,250
0.0	391111	Ekuitas	0	24,050,802,650
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,060,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	809,647
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	251,472
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,388,453,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	35,690	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	176,703,130	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	57,766,600	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,060,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	39,110,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	11,851,622	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	142,667,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	299,613,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	87,380,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	786,977,100	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2100 ) MALUKU

SATUAN KERJA : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:25 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	14,394	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,946,200	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	9,021,458	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	60,540,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	41,206,980	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	76,447,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	4,560,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	149,647,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	56,101,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,909,158,253	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,041,372,351	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	984,152,708	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	79,793,295	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,157,650	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	70,080,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,335,930,630	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	645,908,379	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	116,589,792	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	82,008,294	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	27,702,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	61,757,600	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,100,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	138,054,400	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143,555,620	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	674,767,663	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	485,868,890	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,100,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,400,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,806,499	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,639,506,765	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	159,270,337	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	24,122,874	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	8,233,934	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,484,320	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	33,645,230	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	175,431,910	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	239,903,713	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2100 ) MALUKU

SATUAN KERJA : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:25 PM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			81,441,269,503	81,441,269,503

Keterangan :

FINAL

AMBON, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA

NIP. 198507012009011002



## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2100 ) MALUKU

SATUAN KERJA : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:40 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,552,716,179
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	7,121,119	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,060,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	809,647
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	251,472
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,389,580,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,886	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	176,815,880	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	57,811,700	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,060,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,110,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	11,851,622	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	142,667,400	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	299,613,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	87,380,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	786,977,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,394	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	44,946,200	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9,021,458	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	60,540,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	41,206,980	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	75,670,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	4,560,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	149,647,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	56,101,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,910,554,074	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,041,372,351	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	984,152,708	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	79,793,295	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,157,650	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70,080,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,335,930,630	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	645,908,379	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,864,600	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	118,532,292	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	82,008,294	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	28,694,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	56,257,600	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : ( 2100 ) MALUKU

SATUAN KERJA : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:40 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,100,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	138,054,400	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143,555,620	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	674,767,663	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	246,147,310	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	485,868,890	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,100,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,400,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,806,499	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	196
<b>JUMLAH</b>			<b>17,559,837,494</b>	<b>17,559,837,494</b>

Keterangan :

FINAL

AMBON, 4 Mei 2026  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
  
 JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA  
 198507012009011002

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 2100 ) MALUKU  
**SATUAN KERJA** : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM  
Tgl Cetak : 04/05/26 12:36 PM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	1,494,000	(1,494,000)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	1,494,000	(1,494,000)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	1,494,000	(1,494,000)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	8,395,632,178	7,760,385,321	635,246,857	8.186
Beban Persediaan	33,645,230	153,992,397	(120,347,167)	(78.151)
Beban Barang dan Jasa	7,552,234,748	10,393,501,096	(2,841,266,348)	(27.337)
Beban Pemeliharaan	993,755,193	2,389,981,540	(1,396,226,347)	(58.42)
Beban Perjalanan Dinas	518,175,389	3,214,261,682	(2,696,086,293)	(83.879)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**ESELON I** : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 2100 ) MALUKU  
**SATUAN KERJA** : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON

Tgl Data : 04/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 12:36 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,836,618,230	3,162,368,964	(325,750,734)	(10.301)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>20,330,060,968</b>	<b>27,074,491,000</b>	<b>(6,744,430,032)</b>	<b>(24.911)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(20,330,060,968)</b>	<b>(27,072,997,000)</b>	<b>6,742,936,032</b>	<b>(24.907)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(233,843,713)	1,446,269	(235,289,982)	(16,268.757)
Pendapatan Pelepasan Aset	6,060,000	1,446,269	4,613,731	319.009
Beban Pelepasan Aset	239,903,713	0	239,903,713	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,061,119	421,500	639,619	151.748
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,061,119	421,500	639,619	151.748
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(232,782,594)</b>	<b>1,867,769</b>	<b>(234,650,363)</b>	<b>(12,563.136)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(20,562,843,562)</b>	<b>(27,071,129,231)</b>	<b>6,508,285,669</b>	<b>(24.041)</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(20,562,843,562)</b>	<b>(27,071,129,231)</b>	<b>6,508,285,669</b>	<b>(24.041)</b>

Keterangan :

FINAL

AMBON, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



*Johanis Johniforus Medea*  
JOHANIS JOHNIFORUS/MEDEA

NIP. 198507012009011002

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 05 ) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 2100 ) MALUKU**  
**SATUAN KERJA : ( 215141 ) STASIUN PSDKP AMBON**

Tgl Data : 04/05/26 6:37 AM  
 Tgl Cetak : 04/05/26 12:17 PM  
 Halaman : 1  
 lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,050,802,650	25,756,367,465	(1,705,564,815)	(6.62)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20,562,843,562)	(27,071,129,231)	6,508,285,669	(24.04)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(6,493,632)	6,493,632	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(6,496,332)	6,496,332	(100)
LAIN-LAIN	0	2,700	(2,700)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,559,571,435	25,372,058,048	(7,812,486,613)	(30.79)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3,003,272,127)	(1,705,564,815)	(1,297,707,312)	76.09
EKUITAS AKHIR	21,047,530,523	24,050,802,650	(3,003,272,127)	(12.49)

Keterangan :

FINAL

AMBON, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JOHANIS JOHNIFORUS MEDEA  
 NIP. 198507012009011002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 032  
**ESELON I** : 05  
**WILAYAH/PROVINSI** : 2100  
**SATUAN KERJA** : 215141  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MALUKU**  
**STASIUN PSDKP AMBON**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 04/05/26 12:25 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,295,222,000	2,389,581,000	2,389,580,500	0	2,389,580,500	100	500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	36,000	35,886	196	35,690	99.14	310
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	164,554,000	176,816,000	176,815,880	0	176,815,880	100	120
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53,352,000	57,812,000	57,811,700	0	57,811,700	100	300
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	11,700,000	12,060,000	12,060,000	0	12,060,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	58,890,000	39,110,000	39,110,000	0	39,110,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,000,000	11,852,000	11,851,622	0	11,851,622	100	378
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	134,641,000	142,677,000	142,667,400	0	142,667,400	99.99	9,600
511129	Belanja Uang Makan PNS	245,820,000	300,844,000	299,613,000	0	299,613,000	99.59	1,231,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	69,355,000	87,380,000	87,380,000	0	87,380,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>3,045,576,000</b>	<b>3,218,168,000</b>	<b>3,216,925,988</b>	<b>196</b>	<b>3,216,925,792</b>	<b>99.96</b>	<b>1,242,208</b>
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	699,608,000	787,059,000	786,977,100	0	786,977,100	99.99	81,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	18,000	14,394	0	14,394	79.97	3,606
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	40,992,000	44,947,000	44,946,200	0	44,946,200	100	800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	7,504,000	9,022,000	9,021,458	0	9,021,458	99.99	542
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	60,060,000	60,540,000	60,540,000	0	60,540,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	36,512,000	41,207,000	41,206,980	0	41,206,980	100	20
511628	Belanja Uang Makan PPPK	86,748,000	79,028,000	75,670,000	0	75,670,000	95.75	3,358,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116</b>	<b>931,438,000</b>	<b>1,026,381,000</b>	<b>1,022,936,132</b>	<b>0</b>	<b>1,022,936,132</b>	<b>99.66</b>	<b>3,444,868</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	197,664,000	155,848,000	149,647,000	0	149,647,000	96.02	6,201,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	32,592,000	66,726,000	56,101,000	0	56,101,000	84.08	10,625,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>230,256,000</b>	<b>222,574,000</b>	<b>205,748,000</b>	<b>0</b>	<b>205,748,000</b>	<b>92.44</b>	<b>16,826,000</b>
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,385,000,000	2,910,555,000	2,910,554,074	0	2,910,554,074	100	926
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	867,651,000	1,041,373,000	1,041,372,351	0	1,041,372,351	100	649
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124</b>	<b>3,252,651,000</b>	<b>3,951,928,000</b>	<b>3,951,926,425</b>	<b>0</b>	<b>3,951,926,425</b>	<b>100</b>	<b>1,575</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>7,459,921,000</b>	<b>8,419,051,000</b>	<b>8,397,536,545</b>	<b>196</b>	<b>8,397,536,349</b>	<b>99.74</b>	<b>21,514,651</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 032  
**ESELON I** : 05  
**WILAYAH/PROVINSI** : 2100  
**SATUAN KERJA** : 215141  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MALUKU**  
**STASIUN PSDKP AMBON**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 04/05/26 12:25 PM  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,276,708,000	984,641,000	984,152,708	0	984,152,708	99.95	488,292
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	157,355,000	79,830,000	79,793,295	0	79,793,295	99.95	36,705
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,756,000	9,495,000	9,157,650	0	9,157,650	96.45	337,350
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	92,448,000	70,080,000	70,080,000	0	70,080,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>1,536,267,000</b>	<b>1,144,046,000</b>	<b>1,143,183,653</b>	<b>0</b>	<b>1,143,183,653</b>	<b>99.92</b>	<b>862,347</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,787,300,000	6,264,755,000	5,335,930,630	0	5,335,930,630	85.17	928,824,370
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	26,384,000	0	0	0	0	0	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	439,545,000	652,991,000	645,908,379	0	645,908,379	98.92	7,082,621
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>6,253,229,000</b>	<b>6,917,746,000</b>	<b>5,981,839,009</b>	<b>0</b>	<b>5,981,839,009</b>	<b>86.47</b>	<b>935,906,991</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	122,581,000	23,062,000	22,864,600	0	22,864,600	99.14	197,400
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>122,581,000</b>	<b>23,062,000</b>	<b>22,864,600</b>	<b>0</b>	<b>22,864,600</b>	<b>99.14</b>	<b>197,400</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	209,466,000	118,560,000	118,532,292	0	118,532,292	99.98	27,708
522112	Belanja Langganan Telepon	115,920,000	82,044,000	82,008,294	0	82,008,294	99.96	35,706
522113	Belanja Langganan Air	55,800,000	28,890,000	28,694,000	0	28,694,000	99.32	196,000
522141	Belanja Sewa	101,950,000	56,346,000	56,257,600	0	56,257,600	99.84	88,400
522151	Belanja Jasa Profesi	29,700,000	4,700,000	1,100,000	0	1,100,000	23.4	3,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	149,173,000	162,863,000	138,054,400	0	138,054,400	84.77	24,808,600
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>662,009,000</b>	<b>453,403,000</b>	<b>424,646,586</b>	<b>0</b>	<b>424,646,586</b>	<b>93.66</b>	<b>28,756,414</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	169,507,000	143,766,000	143,555,620	0	143,555,620	99.85	210,380
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,070,909,000	677,649,000	674,767,663	0	674,767,663	99.57	2,881,337
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,000,000	246,632,000	246,147,310	0	246,147,310	99.8	484,690
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>1,535,416,000</b>	<b>1,068,047,000</b>	<b>1,064,470,593</b>	<b>0</b>	<b>1,064,470,593</b>	<b>99.67</b>	<b>3,576,407</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,782,492,000	629,128,000	485,868,890	0	485,868,890	77.23	143,259,110
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103,010,000	15,360,000	15,100,000	0	15,100,000	98.31	260,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24,800,000	25,700,000	5,400,000	0	5,400,000	21.01	20,300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	339,153,000	193,830,000	11,806,499	0	11,806,499	6.09	182,023,501
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>2,249,455,000</b>	<b>864,018,000</b>	<b>518,175,389</b>	<b>0</b>	<b>518,175,389</b>	<b>59.97</b>	<b>345,842,611</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>12,358,957,000</b>	<b>10,470,322,000</b>	<b>9,155,179,830</b>	<b>0</b>	<b>9,155,179,830</b>	<b>87.44</b>	<b>1,315,142,170</b>
53	BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 032  
**ESELON I** : 05  
**WILAYAH/PROVINSI** : 2100  
**SATUAN KERJA** : 215141  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MALUKU**  
**STASIUN PSDKP AMBON**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 04/05/26 12:25 PM  
 Halaman : 3  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker\_poc  
 Tgl Data : 4/5/26 8:05 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	482,136,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	482,136,000	0	0	0	0		0
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660,600,000	0	0	0	0		0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	151,190,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	811,790,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,293,926,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	21,112,804,000	18,889,373,000	17,552,716,375	196	17,552,716,179	92.92	1,336,656,821

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 032  
**ESELON I** : 05  
**WILAYAH/PROVINSI** : 2100  
**SATUAN KERJA** : 215141

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**MALUKU**  
**STASIUN PSDKP AMBON**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 04/05/26 12:27 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,060,000	0	6,060,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	6,060,000	0	6,060,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	809,647	0	809,647	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	251,472	0	251,472	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,061,119	0	1,061,119	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	7,121,119	0	7,121,119	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	7,121,119	0	7,121,119	

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032  
UNIT ORGANISASI : 05  
WILAYAH/PROVINSI : 2100  
SATUAN KERJA : 215141

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN  
MALUKU  
STASIUN PSDKP AMBON

Tgl. Cetak 04/05/2026 12:27 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	16,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,782,670	0
0.0	117114	Suku Cadang	436,853,210	0
0.0	131111	Tanah	6,248,730,383	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	45,677,071,631	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,580,062,080	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	241,228,733	0
0.0	134112	Irigasi	377,598,000	0
0.0	134113	Jaringan	217,671,351	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	239,903,713	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	36,091,203,644
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	795,263,203
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	24,122,874
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	61,754,505
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	26,079,724
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	2,681,171
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,994,000
0.0	391111	Ekuitas	0	24,050,802,650
<b>JUMLAH</b>			<b>61,054,901,771</b>	<b>61,054,901,771</b>

**SHR**



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 215141  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-04**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,112,804,000	21,112,804,000	0
2	Belanja	3,387,890,880	3,387,890,880	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,061,119	1,061,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-JUN-25*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 215141  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-05**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,112,804,000	21,112,804,000	0
2	Belanja	4,677,287,072	4,677,287,072	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,061,119	1,061,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 28-JUN-25*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 215141  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,112,804,000	21,112,804,000	0
2	Belanja	6,469,300,705	6,469,300,705	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,061,119	1,061,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JUL-25*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI MALUKU**  
**KPPN AMBON**

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN**  
**PADA SATKER 215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
**SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-07**

Tgl Cetak : 15/08/25 4:14

Kode Lap : shr\_kppn\_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,112,804,000	21,112,804,000	0
2	Belanja	7,340,492,855	7,340,492,855	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,061,119	1,061,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Agustus 2025*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI MALUKU**  
**KPPN AMBON**

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN**  
**PADA SATKER 215141 - STASIUN PSDKP AMBON**

**SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-08**

Tgl Cetak : 13/09/25 1:38

Kode Lap : shr\_kppn\_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,112,804,000	21,112,804,000	0
2	Belanja	8,421,857,342	8,421,857,342	0
3	Pengembalian Belanja	-196	-196	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,061,119	1,061,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 September 2025*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI MALUKU**  
**KPPN AMBON**

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN**  
**PADA SATKER 215141 - STASIUN PSDKP AMBON**

**SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-09**

Tgl Cetak : 13/11/25 7:31

Kode Lap : shr\_kppn\_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,112,804,000	21,112,804,000	0
2	Belanja	9,717,691,236	9,717,691,236	0
3	Pengembalian Belanja	-196	-196	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,121,119	7,121,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Oktober 2025*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI MALUKU**  
**KPPN AMBON**

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN**  
**PADA SATKER 215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
**SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-10**

Tgl Cetak : 13/11/25 6:59

Kode Lap : shr\_kppn\_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	21,112,804,000	21,112,804,000	0
2	Belanja	11,788,308,546	11,788,308,546	0
3	Pengembalian Belanja	-196	-196	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,121,119	7,121,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 November 2025*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI MALUKU**  
**KPPN AMBON**

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN**  
**PADA SATKER 215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
**SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-11**

Tgl Cetak : 16/12/25 8:32

Kode Lap : shr\_kppn\_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	18,889,373,000	18,889,373,000	0
2	Belanja	13,379,899,912	13,379,899,912	0
3	Pengembalian Belanja	-196	-196	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,121,119	7,121,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	100,020,000	100,020,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,020,000	100,020,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12 Desember 2025*





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI MALUKU**  
**KPPN AMBON**

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN**  
**PADA SATKER 215141 - STASIUN PSDKP AMBON**

**SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12**

Tgl Cetak : 21/01/26 8:44

Kode Lap : shr\_kppn\_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	18,889,373,000	18,889,373,000	0
2	Belanja	17,552,716,375	17,552,716,375	0
3	Pengembalian Belanja	-196	-196	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,121,119	7,121,119	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Januari 2026*



**PENDAPATAN**

**PNBP**

**Pendapatan Dari**  
**Penjualan,**  
**Pengelolaan**  
**BMN, Iuran**  
**Badan Usaha**  
**(4251) :**

- **425122 - Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)**



SALINAN

# RISALAH LELANG

Nomor : 118/17.01/2025-01  
Tanggal : 25 September 2025  
Pejabat Lelang : Crolly Adeles Siahaya, S.H.  
Penjual : Stasiun PSDKP Ambon

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
AMBON

Lembar Pertama  
Pejabat Lelang

Ttd.

Crollly Adeles Siahaya S.H.  
NIP 19840919 200312 1 005

SALINAN  
RISALAH LELANG  
Nomor 118/17.01/2025-01

-----Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (25-09-2025), dimulai pukul sembilan (09:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Crollly Adeles Siahaya Sarjana Hukum, NIP 19840919 200312 1 005 -----  
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.6/2023 tanggal 30 Januari 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-437/KNL.1701/2025 tanggal 25 September 2025 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di KPKNL Ambon, Jl. Raya Pattimura No. 18 Gedung Keuangan Negara Lt. 4 Ambon. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Johanis Johniforus Medea NIP 198507012009011002, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon, berkedudukan di Kota Ambon, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.1774/PSDKPSta.7/PL.430/IX/2025 tanggal 02 September 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-265/KNL.1701/2025 tanggal 02 September 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-130/MK/KNL.1701/2025 tanggal 12 Agustus 2025. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----  
Nancy Samu Samu, Sarjana Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor B.1725/PSDKPSta.7/PL.430/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Ambon. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----  
1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Z 125 Nomor Polisi DE 5024 LM Nomor Rangka MH3SE8890GJ073987 Nomor Mesin E3R2E00900353. -----

Nilai Limit : Rp1.460.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) -----  
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela - Rumah Tiga, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. -----  
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 18 September 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai

berikut:../Lembar Kedua

Pejabat Lelang

Ttd.

Crollly Adeles Siahaya S.H.  
NIP 19840919 200312 1 005

- berikut: -----
- a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
  - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
  - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
- a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
  - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
  - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
- 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
  - 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
- 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
  - 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
  - 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
- 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
  - 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
  - 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang

Pejabat Lelang

Ttd.

Crolly Adeles Siahaya S.H.  
NIP 19840919 200312 1 005

sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: ----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

----Dalam hal.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Crolly Adeles Siahaya S.H.  
NIP 19840919 200312 1 005

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/ giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/ giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang



Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 118/17.01/2025-01 tanggal 25 September 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----  
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----  
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah) -----  
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----  
Jumlah harga barang yang ditahan: -----  
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 25 (dua puluh lima) -----  
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Nancy Samu Samu, S.Pi  
NIP 198601162010122002

Crollly Adeles Siahaya S.H.  
NIP 19840919 200312 1 005

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya  
Tanggal: 30 September 2025

Kepala KPKNL Ambon



Catur Setiono

NIP 19820831 200412 1 001



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250929164343  
Tanggal Billing : 29-09-2025 17:58:46  
Tanggal Kedaluwarsa : 06-10-2025 17:58:46  
Tanggal Bayar : **30-09-2025 05:01:46**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Internet Banking**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Ambon  
Kementerian/Lembaga : **015 - KEMENTERIAN KEUANGAN**  
Unit Eselon I : **09 - Ditjen Kekayaan Negara**  
Satuan Kerja : **538044 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON**  
Total Disetor : 121.200 (IDR)  
Terbilang : *Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **481154311035**  
**NTPN** : **720623CIFTPBS1N**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak  
Kode Akun : 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I  
Jumlah Setoran : 121.200 (IDR)  
Keterangan : Bea Lelang Pembeli Risalah Nomor 118/17.01/2025 - 1 tanggal 25 September 2025



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250929165693  
Tanggal Billing : 29-09-2025 18:04:34  
Tanggal Kedaluwarsa : 06-10-2025 18:04:34  
Tanggal Bayar : **30-09-2025 05:01:48**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Internet Banking**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Ambon  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 6.060.000 (IDR)  
Terbilang : *Enam Juta Enam Puluh Ribu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **857038311217**  
**NTPN** : **ACB843CIFFTPBTBT**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin  
Kode Akun : 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin  
Jumlah Setoran : 6.060.000 (IDR)  
Keterangan : Hasil Bersih Lelang Risalah Nomor 118/17.01/2025 - 1 tanggal 25 September 2025

# **Pendapatan**

## **Lain-Lain**

**(4259) :**

- **425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL**
- **425912 – Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu**

Tanggal dan Jam Bayar : 25/04/2025 06:56:14 NTB : 806320500792  
Tanggal dan Waktu Cetak : 25/04/2025 06:56:14 NTPN : 3884A3CIPTEM2DR5  
Tanggal Buku : 25/04/2025 STAN : 953301  
Kode Cabang Bank : 41  
AMBON  
Data Setoran :  
Kode Billing : 820250422392677  
Nama Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian / Lembaga : 032  
Unit Eselon I : 05  
Satuan Kerja : 215141  
Jumlah Setoran : 2.296,00 Mata Uang : IDR  
Perbilang : dua ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



0. TRX : 83557 500792 95202 25/04/2025 06:56:14  
0. REK. : CASH  
JMLAH : 2.296  
041 - AMBON



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422392677  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:36:08  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:36:08  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:56:14**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 2.296 (IDR)  
Terbilang : *Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **806320500792**  
**NTPN** : **3884A3CIFTEM2DR5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 2.296 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Yochni Anwar Idrus



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422392677  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:36:08  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:36:08  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 2.296 (IDR)  
Terbilang : *Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 2.296 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Yochni Anwar Idrus

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

Tanggal dan Jam Bayar : 25/04/2025 06:56:00  
Tanggal dan Waktu Cetak : 25/04/2025 06:56:00  
Tanggal Buku : 25/04/2025  
Kode Cabang Bank : 41  
AMBON

NTB : 377506487951  
NTPN : B05C07QLV2AK3D38  
STAN : 953299

Data Setoran :  
Kode Billing : 820250422391932  
Nama Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian / Lembaga : 032  
Unit Eselon I : 05  
Satuan Kerja : 215141  
Jumlah Setoran : 20.879,00  
Perbilang : dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422391932  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:33:52  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:33:52  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:56:00**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 20.879 (IDR)  
Terbilang : *Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **377506487951**  
**NTPN** : **B05C07QLV2AK3D3S**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 20.879 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Rizqi Tatri Kusuma



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422391932  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:33:52  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:33:52  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 20.879 (IDR)  
Terbilang : *Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 20.879 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Rizqi Tatri Kusuma

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, *ATM*, *Internet Banking*, *EDC* (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o0o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

Tanggal dan Jam Bayar : 25/04/2025 06:55:45  
Tanggal dan Waktu Cetak : 25/04/2025 06:55:45  
Tanggal Buku : 25/04/2025  
Kode Cabang Bank : 41  
Kode Setoran : AMBON

NTB : 128559484930  
NTPN : 3CF806U8F707MCH5  
STAN : 953296

Kode Billing : 820250422391333  
Nama Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian / Lembaga : 032  
Unit Eselon I : 05  
Satuan Kerja : 215141  
Jumlah Setoran : 1.504,00  
Urut-bilangan : satu ribu lima ratus empat rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*  
*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*  
*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*  
*Dilakukan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



TRX. : 83557 484930 95202 25/04/2025 06:55:45  
REK. : CASH  
JMLAH : 1.504  
41 - AMBON



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422391333  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:31:29  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:31:29  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:55:45**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 1.504 (IDR)  
Terbilang : *Satu Ribu Lima Ratus Empat (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **128559484930**  
**NTPN** : **3CF806U8F707MCH5**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 1.504 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Sunapit M. Taher



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422391333  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:31:29  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:31:29  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 1.504 (IDR)  
Terbilang : *Satu Ribu Lima Ratus Empat (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 1.504 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Sunapit M. Taher

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, *ATM*, *Internet Banking*, *EDC* (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompet Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422390660  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:29:16  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:29:16  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:55:31**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 517 (IDR)  
Terbilang : *Lima Ratus Tujuh Belas (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **033869482181**  
**NTPN** : **ACC7D2G502S9LBS4**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 517 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Nedyia Ibrahim



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422390660  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:29:16  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:29:16  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 517 (IDR)  
Terbilang : *Lima Ratus Tujuh Belas (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 517 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Nedyia Ibrahim

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o0o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422389757  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:26:05  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:26:05  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:55:18**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 37.000 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Puluh Tujuh Ribu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **397240469416**  
**NTPN** : **FC17C48VVO12FAVT**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 37.000 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024 A.n Lukman Bugis



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422389757  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:26:05  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:26:05  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 37.000 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Puluh Tujuh Ribu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 37.000 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024 A.n Lukman Bugis

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o0o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

Tanggal dan Jam Bayar	: 25/04/2025 06:54:53	NTB	: 776700464172
Tanggal dan Waktu Cetak	: 25/04/2025 06:54:53	NTPN	: 2DBB07QLV2AK39UK
Tanggal Buku	: 25/04/2025	STAN	: 953280
Kode Cabang Bank	: 41		
	AMBON		
Data Setoran :			
Kode Billing	: 820250422388692		
Nama Wajib Bayar	: STASIUN PSDKP AMBON		
Kementerian / Lembaga	: 032		
Unit Eselon I	: 05		
Satuan Kerja	: 215141		
Jumlah Setoran	: 2.151,00	Mata Uang	: IDR
Perbilang	: dua ribu seratus lima puluh satu rupiah		

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422388692  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:22:24  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:22:24  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:54:53**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 2.151 (IDR)  
Terbilang : *Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **776700464172**  
**NTPN** : **2DBB07QLV2AK39UK**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 2.151 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 a.n Lukman Bugis



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422388692  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:22:24  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:22:24  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 2.151 (IDR)  
Terbilang : *Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 2.151 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 a.n Lukman Bugis

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetaknya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

Tanggal dan Jam Bayar : 25/04/2025 06:54:38  
Tanggal dan Waktu Cetak : 25/04/2025 06:54:39  
Tanggal Buku : 25/04/2025  
Kode Cabang Bank : 41  
AMBON

NTB : 849494461341  
NTPN : 58EDC7QLV2AK397E  
STAN : 953276

Data Setoran :  
Kode Billing : 820250422387950  
Nama Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian / Lembaga : 032  
Unit Eselon I : 05  
Satuan Kerja : 215141  
Jumlah Setoran : 10.110,00  
Terbilang : sepuluh ribu seratus sepuluh rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan  
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses  
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



01 - AMBON  
JMLAH : 10.110  
J. TRX : 83587 461341 95202  
C. REK : CASH  
25/04/2025 06:54:39



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422387950  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:19:44  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:19:44  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:54:38**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 10.110 (IDR)  
Terbilang : *Sepuluh Ribu Seratus Sepuluh (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **849494461341**  
**NTPN** : **58EDC7QLV2AK397E**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 10.110 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Mohammad Asrar Kelian



## BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422387950  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:19:44  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:19:44  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 10.110 (IDR)  
Terbilang : *Sepuluh Ribu Seratus Sepuluh (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 10.110 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Mohammad Asrar Kelian

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompet Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422386978  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:16:11  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:16:11  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:54:17**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 1.053 (IDR)  
Terbilang : *Satu Ribu Lima Puluh Tiga (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **091788446809**  
**NTPN** : **AA61A6U8F7O7M892**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 1.053 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Widyawati Rumakat



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422386978  
Tanggal Billing : 22-04-2025 14:16:11  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 14:16:11  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 1.053 (IDR)  
Terbilang : *Satu Ribu Lima Puluh Tiga (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 1.053 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Widyawati Rumakat

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompet Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422382097  
Tanggal Billing : 22-04-2025 13:59:07  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 13:59:07  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:54:01**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 301 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Ratus Satu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **179348443404**  
**NTPN** : **EEEF70NAODNGR3GH**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 301 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Mila Fransiska



## BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422382097  
Tanggal Billing : 22-04-2025 13:59:07  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 13:59:07  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 301 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Ratus Satu (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 301 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Mila Fransiska

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompet Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetaknya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

Tanggal dan Jam Bayar : 25/04/2025 06:53:46  
Tanggal dan Waktu Cetak : 25/04/2025 06:53:46  
Tanggal Buku : 25/04/2025  
Kode Cabang Bank : 41

NTE : 261760440480  
NTPN : 8CFD455DFIJES22H  
STAN : 953263

Lokasi : AMBON  
Mata Setoran :  
Kode Billing : 820250422380625  
Nama Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian / Lembaga : 032  
Unit Eselon I : 05  
Satuan Kerja : 215141  
Jumlah Setoran : 677,00  
Perbilang : enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422380625  
Tanggal Billing : 22-04-2025 13:53:35  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 13:53:35  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:53:46**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 677 (IDR)  
Terbilang : *Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **261760440480**  
**NTPN** : **8CFD455DFIJES22H**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 677 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Akadif Ode Ali



## BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422380625  
Tanggal Billing : 22-04-2025 13:53:35  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 13:53:35  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Eselon I : **05** - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  
Satuan Kerja : **215141** - STASIUN PSDKP AMBON  
Total Disetor : 677 (IDR)  
Terbilang : *Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh (IDR)*  
Status : Belum Dibayar  
**NTB** : -  
**NTPN** : -

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 677 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 A.n Akadif Ode Ali

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter bank/pos persepsi*, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompet Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI

Tanggal dan Jam Bayar : 25/04/2025 06:53:30  
Tanggal dan Waktu Cetak : 25/04/2025 06:53:30  
Tanggal Buku : 25/04/2025  
Kode Cabang Bank : 41  
Kantor : AMBON

NTB : 970009427064  
NTPN : 17BD40NAODNGQNT4  
STAN : 953250

Kategori Setoran :  
Kode Billing : 820250422369860  
Nama Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian / Lembaga : 032  
Kategori Eselon I : 05  
Kategori Pekerjaan : 215141  
Jumlah Setoran : 35.000,00  
Keterangan : tiga puluh lima ribu rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



TRX. : 83557 427064 95202 25/04/2025 06:53:30  
REK. : CASH  
NILAI : 35.000  
41 - AMBON



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820250422369860  
Tanggal Billing : 22-04-2025 13:10:06  
Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2025 13:10:06  
Tanggal Bayar : **25-04-2025 06:53:30**  
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK NEGARA INDONESIA**  
Channel Bayar : **Teller**  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : STASIUN PSDKP AMBON  
Kementerian/Lembaga : **032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
Unit Eselon I : **05 - Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**  
Satuan Kerja : **215141 - STASIUN PSDKP AMBON**  
Total Disetor : 35.000 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Puluh Lima Ribu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **970009427064**  
**NTPN** : **17BD40NA0DNGQNI4**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Kode Akun : 425911-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu  
Jumlah Setoran : 35.000 (IDR)  
Keterangan : Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Berupa Uang Makan Bulan Desember 2024 a.n Frans Doni Saraung